

16. Perhubungan

a. Prioritas urusan

Prioritas urusan perhubungan yang masuk ke dalam *dedicated program*, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan, kegiatan:
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway
- 2) Program Pembangunan Transportasi Perairan, kegiatan :
 - Pembangunan Dermaga Pulau Kelapa
 - Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga
 - Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Plaza kabupaten
- 3) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
 - Survey Capaian SPM Transjakarta Busway
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
 - Pembangunan Lajur Uji Mekanis PKB Pulogadung
 - Pembangunan Lajur Uji Mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor PKB Kedaung Angke
 - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor PKB Pulogadung
 - Pelayanan Angkutan Bus Sekolah

b. Program dan kegiatan

Program provinsi Urusan Perhubungan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.154
**Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perhubungan**

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
4	Program Pembangunan Kereta Api Ringan	Program Pembangunan Transportasi Perairan
5	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
6	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan
7	Program Pengembangan SDM Perhubungan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan
8		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Perhubungan
9		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Perhubungan
Jml	7	9

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Urusan Perhubungan pada Tahun 2017 dilaksanakan 9 program dan 29 kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.155
Program Urusan Perhubungan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan	1
2	Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan	1
3	Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan	3
4	Program Pembangunan Transportasi Perairan	3
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan	12
6	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan	1
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan	4
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Perhubungan	2
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Perhubungan	2
Jumlah		29

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Beberapa kegiatan dan hasilnya dalam Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.156 Realisasi Program Urusan Perhubungan

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan	1	1	100 %
2	Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan	1	1	100 %
3	Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan	3	3	100 %
4	Program Pembangunan Transportasi Perairan	3	1	33 %
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan	12	11	92 %
6	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perhubungan	1	1	100 %

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perhubungan	4	4	100 %
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Perhubungan	2	2	100 %
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Perhubungan	2	2	100 %
Jumlah		29	26	90 %

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Prasarana jalan di DKI Jakarta dikelompokkan dalam 6 jenis jalan, dengan total panjang 6.932 km dengan luas 48.3km².

Tabel 3.157
Panjang dan Luas Jalan Menurut Jenisnya

No	Jenis Jalan	Panjang (m)	Luas (m ²)	Status Jalan
1.	Tol			Tol
2.	Arteri Primer	100.457	2.073.227,30	Nasional
3.	Kolektor Primer			Nasional
4	Arteri Sekunder	344.161	4.871.916,20	Provinsi
5.	Kolektor Sekunder			Provinsi
6.	Lokal			Provinsi
Jumlah				

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017 (Dinas Pekerjaan Umum seharusnya)

Tabel 3.158 **Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan**

N0	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	49,792,400,000	39,219,802,900	79 %
2.	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perhubungan	23,000,000,000	12,465,433,500	54 %
3.	Retribusi Terminal	8,650,000,000	5,752,962,487	67 %
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1,500,000,000	1,218,787,500	81 %
5.	Retribusi Penyeberangan air	2,000,520,000	362,900,000	18 %
6.	Pendapatan Denda Restribusi	-	1,574,847,900	100

N0	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi	%
	Perijinan Jasa Umum			
7.	Pendapatan Denda Restribusi Perijinan Jasa Usaha	-	7,025,982	100
		Jumlah	84,942,920,000	60,601,760,269

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan UKD serta UPT di bawahnya, dengan jumlah pegawai sebanyak 1.896 orang.

Tabel 3.159 Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	1896	
	1. Golongan IV	44	
	2. Golongan III	564	
	3. Golongan II	1142	
	4. Golongan I	146	
B.	Eselon	1896	
	1. Eselon I		
	2. Eselon II	2	
	3. Eselon III	27	
	4. Eselon IV	58	
	5. Eselon V		
	6. Jabatan Fungsional Tertentu	86	
	7. Jabatan Fungsional Umum	1723	
C.	Pendidikan	1896	
	1. S3		
	2. S2	51	
	3. S1	274	
	4. Diploma	33	
	5. SLTA	1355	
	6. SLTP	153	
	7. SD	30	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.160
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Perhubungan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	2	2	2	0	2
	Eselon III	27	27	27	7	27
	Eselon IV	58	58	58	26	58
Jumlah		87	87	87	33	87

Sumber : Dinas Perhubungan 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan :

- Tingkat Pendidikan : 87 / 87 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 26 / 87 = 38,00 %
- Kepangkatan : 87 / 87 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perhubungan Terdapat pada Dinas Perhubungan, Sulin dan UPT Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.161
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERHUBUNGAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	466.768.274.320	443.073.236.461	94.92
2. BELANJA LANGSUNG	158.976.018.019	153.553.598.073	96.59
a. BELANJA PEGAWAI	66.613.993.660	48.560.84.428	7.29
b. BELANJA BARANG DAN JASA	89.318.610.982	76.993.976.905	86.20
- Belanja Pemeliharaan	5.343.420.068	3.451.756.100	64.60
c. BELANJA MODAL	3.043.413.377	2.293.587.200	75.36
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	207.614.721.375/ 766.745020.054	153.553.598.073/ 675.914.398.639	22.72
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	3.043.413.377/ 207.614.721.375	2.293.587.200/ 153.553.598.073	1.49
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	5.343.420.068/ 89.318.610.982	3.451.756.100/ 76.993.976.905	4.48
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	5.343.420.068/ 207.614.721.375	3.451.756.100/ 153.553.598.073	2.25

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perhubungan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.162
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perhubungan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	6	1	1	-	1	1	1	5	16
2.	Dishub Dalam Angka	0	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Mobil Keliling	1	-	-	-	-	-	-	8	9
4.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	E-mail	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6.	Mobil VMS	-	-	-	-	-	-	-	5	5
7.	Gerbang VMS	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : <http://dishub.jakarta.go.id>
- E-mail : dishubdki@gmail.com/dishubdki@yahoo.com

Beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk Urusan Perhubungan sebagaimana pada Tabel 3.164

Tabel 3.163 **Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan**

No	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Terminal Bis Antar Kota (Kampung Rambutan, Pulo Gadung, Kalideres, Lebak Bulus)	4 lokasi
2.	Terminal Bis Dalam Kota (Pulo Gadung, Kampung Rambutan, Kalideres, Lebak Bulus, Senen, Kota, Pinang Ranti, Klender, Manggarai, Rawamangun, Grogol, Pasar Minggu, Tanjung Priok, Blok M, Muara Angke, Ragunan dan Cililitan)	17 lokasi
3.	Terminal Mobil Barang (Tanah Merdeka dan Pulogebang)	2 lokasi
4.	Pelabuhan/Dermaga Penyebrangan	
	Pelabuhan Penyebrangan (Muara Angke, Pulau Payung, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pramukadan Pulau Kelapa)	8 lokasi
5.	Pengujian kendaraan Bermotor (Ujung Menteng, Pulogadung, Cilincing).	4 lokasi*

No	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah
6.	CCTV (di Terminal Pulogadung, Kp. Rambutan, Kalideres dan 57 lokasi untuk lalu lintas)	360 unit
7.	Halte Bis (termasuk Halte Busway)	
	- Halte Bus <i>Non Busway</i>	1303 buah
	- Halte Bus <i>Busway</i>	217 buah
8.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) (termasuk JPO Busway)	
	- JPO Busway	167 buah
	- JPO Non Busway	134 buah
9.	Bus Sekolah	
	- Bus Sedang (30 pnp)	95 unit
	- Bus Kecil (23 pnp)	45 unit
10.	- Lajur Uji Kendaraan Bermotor	17 lajur**
	- Mobil PKB Keliling	10 unit

*) 1 lokasi pengujian (5 lajur PKB Jagakarsa) tidak difungsikan

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Perhubungan termasuk urusan pelayanan dasar, sehingga dalam proses perencanaan memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung. Partisipasi tersebut antara lain diakomodasikan dalam Forum Musrenbang mulai dari tingkat RW sampai ke Provinsi.

Tabel 3.164 Sinkronisasi Perencanaan Program Perhubungan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	12	RKPD : RENJA SKPD	100%
2	RENJA SKPD 2017	12	RENJA SKPD :RKA	75%
3	RKA 2017	9	RKA : DPA	100%
4	DPA 2017	9	DPA	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

h. Permasalahan dan solusi

Dilihat dari sisi perhubungan dan atau lalu lintas, Kota Jakarta dikenal dengan kemacetan lalu lintasnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor selama 5 (lima) tahun terakhir (2010-2016) sebesar $\pm$ 10 juta unit tidak seimbang dengan pertumbuhan ruas jalan. Untuk penambahan ruas jalan di DKI Jakarta sangat sulit untuk diwujudkan, karena lahan yang sangat terbatas dan harga

tanah yang sangat tinggi. Beberapa pendekatan sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, antara lain seperti :

- 1) Pembangunan Jaringan Sistem BRT/Busway yang terintegrasi dengan modal Transportasi lain (KA, Terminal Bus) serta pusat-pusat kegiatan.
- 2) Pembangunan Busway Koridor lanjutan (Bekasi, Tanggerang).
- 3) Pengembangan *Feeder Busway* (termasuk APTB dan angkutan regular/bus sedang terintegrasi dengan *busway*).
- 4) Pembatasan lalu lintas dengan 3 in 1 (*three in one*) yang nantinya diganti dengan sistem plat nomor ganjil genap sebagai transisi ke sistem ERP.
- 5) Pengendalian dan penataan parkir on street.
- 6) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan penerapan ITS (Intelligent Transport System) yang meliputi ATCS, *Bus Trecking System* dan *Traffic Information System*.
- 7) Pelebaran jalan dan perbaikan fasilitas jalan (Persimpangan, *U-turn*, Pulau-Pulau, Portal, Marka dll)

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Perhubungan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.165
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Perhubungan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi 2. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran 3. Perda No 10 Tahun 2014

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		tentang Pengelolaan Sistem BRT
2.	PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	4. Pergub Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran 5. Pergub Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan 6. Pergub Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Angkutan Sekolah 7. Pergub Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Angkutan Perairan Kepelabuhanan 8. Pergub Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Sistem Pengendali lalu Lintas 9. Pergub Nomor 110 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UP Perparkiran 10. Pergub Nomor 161 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan 11. Pergub Nomor 181 Tahun 2012 tentang SPM UP Perparkiran 12. Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas 13. Pergub Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik 14. Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

17. Komunikasi dan Informatika

a. Prioritas urusan

- Pengembangan komunikasi dan informatika yang bertujuan untuk menciptakan sistem kehumasan yang lebih baik, modern dan luas sehingga masyarakat memperoleh hak publiknya dari penyelenggaraan pemerintahan.
- Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (e-government) yang dimulai dengan proses perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) dan proses pengadaan barang (*e-procurement*) serta pengawasan.

b. Program dan Kegiatan

Program nasional Urusan Komunikasi dan Informatika yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.166
Perbandingan Program Nasional dan Program Povinsi
Urusan Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
4		Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
5		Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
6		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
7		Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Komunikasi dan Informatika
8		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika
9		Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Komunikasi dan Informatika
Jml	2	9

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Program Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2017 terdapat 9 program dengan 149 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.167
Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No	SKPD/Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3
2.	Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik	39
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	31
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi	8
5.	Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	2
6.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika	57
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Komunikasi dan Informatika	4
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	4
9.	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Komunikasi dan Informatika	1
Jumlah		149

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

Tabel 3.168
Realisasi Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No	SKPD/Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	3	100
2.	Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik	39	38	97
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	31	31	100
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi	8	7	88
5.	Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	2	2	100
6.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika	57	57	100
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Komunikasi dan Informatika	4	4	100
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika	4	4	100
9.	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Komunikasi dan Informatika	1	1	100
Jumlah		149	147	99

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Beberapa kegiatan dan hasil lainnya.

1) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

- Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media pada tahun 2017 sebesar 89% dari total aduan 245.559 yang direspon adalah 219.280.
- PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan informasi kepada 159 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 150 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 9 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum. Pemohon

menyampaikan permohonan informasi publiknya dengan cara mendatangi langsung desk pelayanan informasi sebanyak 23 pemohon dan melalui portal/website PPID <http://ppid.jakarta.go.id> sebanyak 136 pemohon.

- Pelayanan informasi pemberitaan implementasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Website beritajakarta.com baik dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
- Tersedianya data dan informasi pemprov DKI melalui website “www.jakarta.go.id” kepada publik
- Tersedianya media tercetak di Pemprov DKI pada tahun 2017, penerbitan Majalah Media Jaya sebagai majalah internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 (enam) edisi, dimana tema masing-masing edisi disesuaikan dengan kebijakan dan atau program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta perkembangan isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tema yang diangkat pada majalah Media Jaya Tahun 2017 antara lain:
 - a. Edisi I : Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta
 - b. Edisi II : Transportasi di Jakarta
 - c. Edisi III : Ekonomi Kreatif di Jakarta
 - d. Edisi IV : Penataan Rusun di Jakarta
 - e. Edisi V : Asian Games
 - f. Edisi VI : Terima Kasih Ahok - Djarot

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Penyebarluasan Wireless (Wifi) Pada Tahun 2017 yang terkoneksi pada wilayah-wilayah tertentu sebanyak 323 titik.

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Terintegrasinya 380 data set ke peta Jakarta Smart City
- Pengembangan sistem penataan dan pengembangan Aplikasi e-Absensi dan e-TKD, Aplikasi PTSP, Aplikasi SIPKD, Serta sistem e-Kinerja Pendukung Kebijakan Remunerasi

4) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik

- Pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi E-procurement Nasional.
- Meningkatnya jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih dari 1075 orang

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 diselenggarakan oleh Dinas dan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.169
Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	232	
	1. Golongan IV	17	
	2. Golongan III	187	
	3. Golongan II	27	
	4. Golongan I	1	
B.	Eselon	232	
	1. Eselon I	0	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	15	
	4. Eselon IV	39	
	5. Eselon V	0	
	6. Fungsional	5	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	7. Pelaksana	172	
C.	Pendidikan	232	
	1. S3	0	
	2. S2	23	
	3. S1	144	
	4. Diploma	23	
	5. SLTA	39	
	6. SLTP	1	
	7. SD	2	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.170
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	0	1
2	Eselon III	15	15	15	8	15
3	Eselon IV	39	39	39	14	39
Jumlah		55	55	55	22	55

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 55/55 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 22/55 = 40,00 %
- Kepangkatan : 55/55 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.171
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA	276,465,381,705	237,522,866,804	85,91
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	95.218.124.720	84.691.593.771	88,94
2. BELANJA LANGSUNG	181,247,256,985	152,831,273,033	88,32

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	117,150,277,428	95,676,133,780	81,67
- Belanja Pemeliharaan	21,717,645,101	18,007,938,950	82,92
c. BELANJA MODAL	64,096,979,557	57,155,139,253	89,17
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	276,465,381,705		
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	64,096,979,557	276,465,381,705	23,18
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	21,717,645,101	117,150,277,428	18,54
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	21,717,645,101	276,465,381,705	7,86

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana

Sarana yang digunakan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.172
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1		7
2.	Twitter @jakarta.go.id	1								1
3.	Mobil Keliling	2	1	1	1	1	1			7
4.	Media Masa	1								1
5.	Leaflet	8								8
6.	Poster	8								8
7.	Website	2	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10	SMS center 02132881818	1								1
11	LAPOR 1708	1								1
12	Call Center 112	1								1

Sumber : Dinas Kominfo Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : <http://www.jakarta.go.id/www.beritajakarta.com>
- E-mail : dki@jakarta.go.id
- Call Center : 112

Sarana dan prasarana untuk melaksanakan operasional Urusan Komunikasi dan Informatika yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan lebih merupakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) teknologi informasi. Sedangkan untuk urusan kehumasan lebih kepada alat operasional sebagaimana padaberikut

Tabel 3.173
Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kehumasan

No	Nama/Jenis Barang
1)	Kamera Video
2)	Alat Editing Video
3)	Note Book
4)	SMS Center
5)	E-mail
6)	Situs Berita
7)	Kamera Foto
8)	Video Tave Recorder
9)	TV Monitor
10)	Faximile
11)	Mesin Foto Copy
12)	Personal Komputer
13)	Situs Data & Informasi

Sumber : Dinas Kominfotik Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Komunikasi dan Informatika lebih merupakan pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga proses perencanaan lebih bersifat *top down*. Perencanaan tersebut tidak terlepas dari kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan aerah.

Tabel 3.174
Sinkronisasi Perencanaan Program Komunikasi dan Informatika

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	9	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	9	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	9	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	9		
5	DPAP	10		

Sumber : Dinas Kominfomas Prov. DKI Jakarta Tahun 2017

h. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan kehumasan Provinsi DKI Jakarta

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan kompetensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Terbatasnya waktu untuk memasukan usulan harga komponen barang yang dibutuhkan sehingga sulit memperbaharui ke dalam sistem.
3. Terbatasnya kapasitas dan media backup data pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE
4. Aplikasi SPSE dan aplikasi lainnya seperti SiRUP dan SPSE mengalami gangguan karena adanya pengembangan/ perubahan/ update versi di aplikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pembuat aplikasi tersebut.
5. Kurangnya perangkat kerja untuk mendukung aktifitas yang tinggi sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan.
6. Ketidaksiapan SKPD/ UKPD dalam memenuhi kebutuhan dokumen pendukung sebagai pedoman pengembangan aplikasi.
7. Terkait pengelolaan informasi, PPID pada SKPD/UKPD belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Belum meratanya ketersediaan desk pelayanan informasi

publik pada SKPD/UKPD untuk memudahkan pemohon informasi melakukan pelayanan informasi publik.

9. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
10. Integrasi berita media massa yang dilakukan pada tahun 2017 terkendala karena karakteristik media massa yang berbeda-beda. Aktualisasi media cetak tertinggal dari media elektronik lainnya seperti TV dan online yang real-time sehingga perlu mendapat perhatian dalam akurasi saat analisis data.
11. Tindaklanjut SKPD/UKPD terhadap aspirasi publik yang kurang tepat terkait karena kurangnya pemahaman serta kesadaran untuk menindak lanjuti aduan masyarakat

Sedangkan solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut antara lain:

1. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan perlu didukung Tenaga Ahli Profesional serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) .
2. Mengatur jadwal untuk melakukan survey harga pasar sebagai pendukung dalam updating komponen harga.
3. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di LPSE untuk meningkatkan kapasitas dan media backup data sehingga proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan dengan optimal.
4. LPSE Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dan konsultasi terkait permasalahan teknis tersebut ke LKPP agar permasalahan teknis gangguan pada aplikasi SPSE
5. Penambahan sarana kerja dan optimalisasi pemeliharaan perangkat kerja
6. Mendorong SKPD untuk menyiapkan dokumen pendukung sebagai pedoman pengembangan aplikasi seperti SOP, dan lain-lain
7. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID seluruh PPID pada SKPD/UKPD maka dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada PPID SKPD/UKPD

mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;

8. Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasi dengan baik;
9. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan baik dengan menempatkan desk pelayanan informasi, tidak hanya pada PPID Provinsi, tetapi juga seluruh PPID pada SKPD/UKPD, agar dapat lebih mudah di akses oleh masyarakat.
10. Mengevaluasi efektifitas media massa cetak terhadap media massa jenis lainnya serta perlunya strategi untuk menganalisa data secara periodik agar mendapatkan analisa data berita secara aktual.
11. Mengadakan sosialisasi kepada SKPD/UKPD melalui seluruh kanal informasi yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Povinsi DKI Jakarta sehingga aspirasi publik ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan sesuai harapan masyarakat

Saat ini Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

i. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Prestasi Daerah :

- 1) Stand Terbaik Kategori Pemda / BUMN pada Jakarta Fair Kemayoran 2017
- 2) Apresiasi Tata Kelola pintar Berbasis Teknologi 2017
- 3) WeGo : Open City Silver Award
- 4) Digital Marketing Award, Province Government Site
- 5) Peringkat ke-1 Hasil Pemeringkatan Keterbukaan

Informasi SKPD Tahun 2017 (Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta)

- 6) Peringkat ke-4 Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 (Komisi Informasi Pusat)

18. Pertanahan

a. Prioritas urusan

- Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
- Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

b. Program dan Kegiatan

Program Urusan Pertanahan tahun 2017 berjumlah 1 Program

Tabel 3.175
Program Urusan Pertanahan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota	1
Jumlah		1

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja kegiatan urusan pertanahan Tahun 2017 sebesar 73,58% dari rencana kegiatan

Tabel 3.176 Realisasi kegiatan Tahun 2017

No	Program	Jumlah		
		Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota	457,776,250	336,840,000	73,58
Jumlah		457,776,250	336,840,000	73,58

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan Urusan

Mulai Tahun 2017 urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan dan Pemetaan di Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan. Bidang pertanahan dan pemetaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dasar, penyusunan peta dasar dan peta tematik, serta menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan perencanaan pertanahan sedangkan terkait pembelian dan pembebasan tanah tersebar di beberapa SKPD/UKPD.

Gambaran kondisi SDM urusan pertanahan secara rinci berdasarkan Golongan, Jabatan serta tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut.

Rekapitulasi Pegawai Urusan Pertanahan

NO	KUALIFIKASI		JUMLAH	KETERANGAN
A	Golongan			
	1	Golongan IV	3	
	2	Golongan III	15	
	3	Golongan II	2	
	4	Golongan I	1	
B	Eselon			
	1	Eselon I	0	
	2	Eselon II	0	
	3	Eselon III	1	
	4	Eselon IV	3	
	5	Eselon V	0	
	6	Fungsional	0	
	7	Pelaksana (Staf)	17	
C	Pendidikan			
	1	S3	0	
	2	S2	4	
	3	S1	14	
	4	Diploma	0	
	5	SLTA	2	
	6	SLTP	1	

NO	KUALIFIKASI		JUMLAH	KETERANGAN
	7	SD	0	

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.177
**Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksanaan
Urusan Pertanahan**

NO	SKPD	JUMLAH JABATAN	JABATAN YANG TERISI	KESESUAIAN		
				PENDI- DIKAN	DIKLAT- PIM	PANGKAT
1	Eselon II					
2	Eselon III	1	1	1	0	1
3	Eselon IV	3	3	3	3	3
Jumlah		4	4	4	3	4

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi kesesuaian jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : $4 / 4 = 100,00\%$
- Diklat Kepemimpinan : $3 / 4 = 75,00\%$
- Kepangkatan : $4 / 4 = 100,00\%$

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pertanahan pada Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 457.776.250 tetapi yang terserap sebesar Rp 336.840.000 (73,58%) adalah sebagai berikut

Tabel 3.178
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERTANAHAN	457.776.250	336.840.000	73,58
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-
2. BELANJA LANGSUNG	457.776.250	336.840.000	73,58
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	457.776.250	336.840.000	73,58

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pemeliharaan	-	-	-
c. BELANJA MODAL	-	-	-
CATATAN PERBANDINGAN : PERBANDINGAN :			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	457.776.250	61.821.923.000.480	0,00
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	-	457.776.250	0,00
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	-	457.776.250	0,00
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	-	457.776.250	0,00

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2017

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pertanahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.179
Sarana dan prasarana

NO	JENIS FASILITAS / PRASARANA	JUMLAH FASILITAS PADA DINAS/ SUDIN								Jml
		PROV	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1	Papan Pengumuman									
2	Kota Pengaduan									
3	Website								1	1

Catatan Perbandingan :

- Website : <http://dcktrp.jakarta.go.id>
- E-Mail : dinas_cktrp@jakarta.go.id

Beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan Urusan Pertanahan, antara lain:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. GPS | b. Server |
| c. Total Station | d. Software Autocad & Arcgis |
| e. Distometer | f. Eskavator |
| g. Printer/Plotter/PC/Laptop | h. KDO Lapangan |
| i. Theodolite | |

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan dalam Urusan Pertanahan masih bersifat *top down*, karena urusan pertanahan yang bersifat pelayanan pensertifikatan tanah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi teknisnya di daerah (Kanwil dan Kantor BPN).

Tabel 3.180 Sikronisasi Perencanaan Program Urusan Pertanahan

NO	DOKUMEN	JUMLAH PROGRAM	PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM	%
1	RKPD	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA	1	RKA : DPA	100
4	DPA	1		

h. Permasalahan dan Solusi

- Kewenangan di bidang pertanahan masih terbatas khususnya pelayanan pensertifikatan tanah yang masih menjadi kewenangan Pusat. Untuk itu dilakukan kerjasama pensertifikatan tanah dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- Masih banyak konflik pertanahan, khususnya konflik kepemilikan tanah. Guna mengatasinya, selain dengan sosialisasi pertanahan juga dengan penyelesaian konflik pertanahan melalui jalur musyawarah maupun jalur hukum.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- SOP yang dimiliki Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Urusan Pertanahan Yaitu :
 - a. Bidang Pertanahan dan Pemetaan :
 - Penerbitan Peta Informasi Zonasi

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Prioritas urusan

Terdapat 4 Program Prioritas Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, yaitu :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik.
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- d. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol) yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.181

**Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kesbangpol**

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
3		Program Pendidikan Politik Masyarakat
4		Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
	2	4

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017 terdapat 4 Program, yaitu :

Tabel 3.182 **Program Urusan Kesatuan Bangsa**

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	7

2.	Pendidikan Politik Masyarakat	6
3.	Pencegahan dan Penanggulangan konflik	11
4.	Program Penguatan Hubungan Kelembagaan	6
Jumlah		30

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian standar pelayanan minimal dalam hal ini diindikasikan oleh pencapaian rencana kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.183 Realisasi Program Urusan Kesatuan Bangsa

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	7	7	100
2.	Pendidikan Politik Masyarakat	6	6	100
3.	Pencegahan dan Penanggulangan konflik	11	11	100
4.	Program Penguatan Hubungan Kelembagaan	6	6	100
Jumlah		30	30	100

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

Pencapaian Penetapan Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI / PENCAPAIAN	%
1	2	3	4	5
1	Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan	48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan	37 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan	77,08%
2	Cakupan sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan	50 Sekolah	50 Sekolah	100%
3	Skala Indeks Demokrasi	85 Poin	70,85 Poin	83,35%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI / PENCAPAIAN	%
4	Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak pilih memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu	5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)	4.700 orang dari ±5.000 pemilih pemula	94%
5	Jumlah Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri	5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar	5 Ormas dan 25 LSM	100%
6	Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif	100% Partai politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi	9 Parpol yang memperoleh kuota Legislatif yang difasilitasi	90%
7	Jumlah konflik di kalangan masyarakat	10 Konflik	10 konflik	100%

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

Pada tahun 2017 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta juga dibentuk di setiap Kota Administrasi. Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 (lima) wilayah kota administrasi sebanyak 136 orang.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dibentuk di setiap Kota. Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sebanyak 136 orang.

Tabel 3.184 Rekapitulasi Pegawai Badan Kesbangpol

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	136	
	1. Golongan IV	29	

	2. Golongan III	82	
	3. Golongan II	25	
	4. Golongan I	-	
B.	Eselon	136	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	10	
	4. Eselon IV	35	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	90	
	7. Pelaksana (Staf)	-	
C.	Pendidikan	136	
	1. S3	-	
	2. S2	25	
	3. S1	61	
	4. Diploma	10	
	5. SLTA	38	
	6. SLTP	1	
	7. SD	1	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.185 **Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Kesbangpol**

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	-	1
2	Eselon III	10	10	10	9	10
3	Eselon IV	35	35	33	34	35
Jumlah		46	46	44	43	46

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 44 / 46 = 96 %
- Diklat Kepemimpinan : 43 / 46 = 93 %
- Kepangkatan : 46 / 46 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2017 dari APBD sebesar Rp.71.717.552.439,-

termasuk didalamnya anggaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 (lima) wilayah Kota Administrasi.

Tabel 3.186

Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KESATUAN BANGSA Dan POLITIK	52.802.238.160	48.869.557.738	92,55
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.915.314.279	14.782.025.344	78,15
2. BELANJA LANGSUNG	3.633.080.000	1.225.620.000	33,74
a. BELANJA PEGAWAI	15.282.234.279	13.556.405.344	88,71
b. BELANJA BARANG DAN JASA	106.800.627	106.800.627	100,00
Belanja pemeliharaan	0	0	
c. Belanja modal	52.802.238.160	48.869.557.738	92,55
CATATAN PERBANDINGAN :			
· Alokasi anggaran urusan : Belanja APBD	71.717.552.439	59.685.552.609.233	
· Belanja modal : belanja urusan	0	63.651.583.082	
· Belanja pemeliharaan : belanja barang & jasa	106.800.627	13.556.405.344	
· Belanja pemeliharaan : belanja urusan	106.800.627	63.651.583.082	

Sumber : LKPD 2017 *unreviwed* BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kesbangpol tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.187

Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	-	-	6
2.	Kotak	-	-	-	-	-	-	-	-	0

	Pengaduan									
3.	Leaflet	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	1	1	1	1	1	-	-	6
8.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

Catatan :

- Website : bakesbangpoldki.jakarta.go.id
- E-mail : bakesbangpoldki@jakarta.go.id

Tabel 3.188 **Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol**

	Uraian Sarana/ Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan operasional roda 4	2 unit
2.	Kendaraan operasional roda 2	-
3.	Gedung YLBHI Jl. Dipenogoro No. 7	1 Bangunan

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan dilakukan kombinasi antara *top down* dan *bottom up* dengan mengoptimalkan forum Musrenbang dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Provinsi, yang dikoordinasikan oleh Kappeko/Kappekab dan Bapeda.

Tabel 3.189 **Sikronisasi Perencanaan Program Kesbangpol**

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	4	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	4		

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan Solusi

Belum dapat terlaksananya seluruh program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2017 dikarenakan adanya beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Penyerapannya menyesuaikan dengan kondisi dalam pelaksanaannya :
 - Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional
- b. Efisiensi honorarium tenaga ahli
 - Pendataan Organisasi Masyarakat Asing yang Beraktivitas di DKI Jakarta
- c. Keterlambatan penetapan DPPA tahun 2017

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri atau peraturan yang berkaitan dengan urusan Kesbangpol yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut

Tabel 3.190
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kesbangpol

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah	1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat. 5. Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2007 yang telah diubah sebagaimana Pergub Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama 6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122/2013 tentang pembentukan Forum Komunikasi Antar Komponen Masyarakat 7. Keputusan Gubernur No 567 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Prioritas urusan

- Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
- Program Penanggulangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
- Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pengembangan Data/Informasi SKPD
- Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Secara Elektronik

- Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
- Program Pelayanan Pajak Daerah
- Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
- Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
- Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Pendidikan dan Pelatihan
- Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.191

Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
3	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jml	3	3

Program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tersebar pada SKPD-SKPD pelaksana urusan.

Tabel 3.192
**Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
 Administrasi Keuangan Daerah,
 Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan
1.	Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta	209
a.	Biro Tata Pemerintahan	16
	1. Program Koordinasi Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1
	2. Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	1
	3. Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri	9
	4. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	1
	5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	3
	6. Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah	1
b.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	18
	1. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	4
	1. Program Peningkatan Pengelolaan Kantor	6
	2. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	8
c.	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	28
	1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	6
	2. Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	8
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	11
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	3
d.	Biro Hukum	16

	1. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1
	2. Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	8
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	6
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1
e.	Biro Perekonomian	20
	1. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian	13
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	7
f.	Biro Umum	31
	1. Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah	8
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	23
g.	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	21
	1. Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota	16
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	5
h.	Biro Administrasi Sekretariat Daerah	17
	1. Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah	2
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	9
	3. Program Pengelolaan Rumah Dinas	1
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	3
	5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	2
i.	Biro Kesejahteraan Sosial	21
	1. Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	16
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	5
j.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	20
	1. Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga Serta Pembinaan Mental Spritual	13
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat	7

	Daerah. Kepegawaian dan Persandian	
2.	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	15
	1. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	6
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3
3.	5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten	5.742
a.	Jakarta Pusat	1.137
	1. Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kab	2
	2. Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kab	1
	3. Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kab	2
	4. Pembangunan Gedung Kota Kecamatan dan Kelurahan	2
	5. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	32
	6. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	484
	7. Peningkatan dan pengelolaan Kantor	563
	8. Pengelolaan Rumah Dinas	1
	9. Pengelolaan Kendaraan Dinas	50
b.	Jakarta Timur	1.753
	1. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/KabupatenProgram	2
	2. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten	1
	3. Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten	2
	4. Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	8
	5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	20
	6. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	2
	7. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	3
	8. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	40
	9. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	760
	10. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan	839

	Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah dan Persandian	76
	11. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	
C.	Jakarta Selatan	1.762
	1. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	0
	2. Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten	0
	3. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten	2
	4. Program Pembangunan Gedung, Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6
	5. Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum & Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten	2
	6. Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten	0
	7. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten	0
	8. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	890
	9. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	75
	10. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	0
	11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0
	12. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan	40
	13. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	746
	14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	0
	15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0

	16. Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	0
	17. Program Administrasi Umum & Keprotokolan	1
d.	Jakarta Barat	1.702
	1. Program Penanggulangan Kebakaran	3
	2. Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah	5
	3. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	66
	4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian, dan Persandian	831
	5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2
	6. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan	32
	7. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	700
	8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI	2
	9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	1
	10. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1
	11. Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	7
	12. Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran	3
	13. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2
	14. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	10
	15. Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten	2
	16. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten	2
	17. Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	7
	18. Oprogram Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	1
	19. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	2

	20. Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten	1
	21. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	22
e.	Jakarta Utara	916
	1. Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten	2
	2. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten	2
	3. Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan/Kelurahan	4
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	38
	5. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1
	6. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia	2
	7. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	467
	8. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan	24
	9. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	376
f.	Kepulauan Seribu	206
	1. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi	1
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM	1
	3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2
	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	1
	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2
	6. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten	2
	7. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten	1
	8. Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten	2

	9. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	93
	10. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	2
	11. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	13
	12. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan	14
	13. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	72
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	88
	1. Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
	2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	31
	3. Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	1
	4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	54
	5. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	1
5.	Badan Kepegawaian Daerah	35
	1. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	4
	2. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	5
	3. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI	1
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI	12
	5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	9
	7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	1
	8. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	3
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52
	1. Program pendidikan dan pelatihan	24
	2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat	10
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1
	4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan	

	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	16
	5. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1
7.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	88
	1. Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah	4
	2. Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah	4
	3. Program Pelayanan Pajak Daerah	53
	4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	23
	5. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	2
	6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	2
8.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	463
	1. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman	2
	2. Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman	300
	3. Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota	23
	4. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman	11
	5. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman	32
	6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup	73
	7. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Lingkungan Hidup	1
	8. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Lingkungan Hidup	14
	9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Lingkungan Hidup	2
	10. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Li Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	2
	11. Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	1
	12. Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah	1
	13. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1
9.	Satpol Pamong Praja	30
	1. Program Peningkatan Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15

	2. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan	1
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	12
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	2
10.	Sekretariat DPRD	64
	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	19
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	38
	3. Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	2
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian. rogram penataan kelembagaan, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	1
	5. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. Dan Persandian.	4
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.	
12.	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	16
	2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	9
	3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	1
13.	Badan Pengelola Aset Daerah	151
	1. Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1

	Daerah	
	2. Program Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah	57
	3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian.	90
	4. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian.	3
14.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	19
	1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	17
	2. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	2
	Jumlah Total	6.848

Sumber : SKPD/UKPD masing-masing, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.193 Volume Kelulusan dan Pelatihan

NO	KEGIATAN	Peserta (Pegawai)	Lulus (Pegawai)
1	Diklat Kepemimpinan TK. III	30	30
2	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	90	89
3	Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah	90	90
4	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	150	150
5	Diklat Manajemen BLUD	120	120
6	Diklat Manajemen Sekolah	320	290
7	Diklat Kepemimpinan TK. IV	60	58
8	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	104	161

9	Diklat Prajabatan Golongan I dan II (K1/K2)	1.868	1.865
10	Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)	3.210	3.207
11	Diklat Pelayanan Prima	120	120
12	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300	288
13	Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Manajemen	90	90
14	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	60	60
15	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	90	89
16	Diklat Revolusi Mental	300	295
17	Diklat Bendahara Pengeluaran	90	90
18	Diklat Teknis Training of Fasilitator	30	30
19	Diklat Pengawas Sekolah	90	105
20	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi	150	149
21	Pengiriman Kediklatan	163	572
22	Diklat PPNS	30	30
23	Diklat Teknis Perundang-undangan	30	30
24	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum	90	89
	JUMLAH	7.657orang	8.097 orang

Sumber : Badan Diklat Prov. DKI Jakarta 2017

Tabel 3.194
**Capaian Kegiatan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1.	Setda	237	218	91,98
	a. Biro Tata Pemerintahan	16	14	87,5
	b. Biro Organisasi dan RB	18	18	100
	c. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	28	28	100
	d. Biro Hukum	16	16	100
	e. Biro Perekonomian	20	20	100
	f. Biro Umum	31	31	100
	g. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	24	21	100
	h. Biro Adiministrasi Sekretariat	17	17	100

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
	Daerah			
	i. Biro Kesejahteraan Sosial	21	21	100
	j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	20	20	100
2.	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	4	4	100
3.	5 Wilayah Kota + 1 Kabupaten			
	a. Jakarta Pusat	1137	1087	95,60
	b. Jakarta Timur	1.753	1.753	100
	c. Jakarta Selatan	1789	1762	98,50
	d. Jakarta Barat	1604	1532	93,32
	e. Jakarta Utara	916	824	89,96
	f. Kepulauan Seribu	206	191	92,72
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	89	88	98,88
5.	Badan Kepegawaian Daerah	35	35	100
6.	BPSDM	52	52	100
7.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	88	84	95,45
8.	Dinas Pemadam Kebakaran			
9	Satpol PP	30	24	80
10.	Sekretariat DPRD	64	64	100%
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
12.	BPTSP	26	25	96,15
13	BPBJ	19	19	100
14	BPAD	151	143	94,82
Jumlah				

Sumber : SKPD/UKPD masing-masing, 2017

Tabel 3.195 Jenis dan Jumlah Kelulusan Peserta Diklat Tahun 2017

NO	KEGIATAN	Lulus (Pegawai)
1	Diklat Kepemimpinan TK. III	30
2	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	89
3	Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah	90
4	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	150
5	Diklat Manajemen BLUD	120

6	Diklat Manajemen Sekolah	290
7	Diklat Kepemimpinan TK. IV	58
8	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	161
9	Diklat Prajabatan Golongan I dan II (K1/K2)	1.865
10	Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)	3.207
11	Diklat Pelayanan Prima	120
12	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	288
13	Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Manajemen	90
14	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	60
15	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	89
16	Diklat Revolusi Mental	295
17	Diklat Bendahara Pengeluaran	90
18	Diklat Teknis Training of Fasilitator	30
19	Diklat Pengawas Sekolah	105
20	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi	149
21	Pengiriman Kediklatan	572
22	Diklat PPNS	30
23	Diklat Teknis Perundang-undangan	30
24	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum	89
	JUMLAH	8.097 orang

Sumber : Badan Diklat Prov. DKI Jakarta 2017

Otonomi Daerah :

- 1) Perda yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 6 dari 32 Raperda yang diajukan. Dari jumlah tersebut tidak ada Raperda yang dibatalkan.

Tabel 3.196 **Daftar Perda Tahun 2017**

No	Nomor Perda/Pergub	Judul Perda/Pergub
1.	Perda Nomor 1 Tahun 2017	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2.	Perda Nomor 2 Tahun	Penyelenggaraan

No	Nomor Perda/Pergub	Judul Perda/Pergub
	2017	Perpustakaan
3.	Perda Nomor 3 Tahun 2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
4.	Perda Nomor 4 Tahun 2017	Kearsipan Daerah
5.	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah Tahun Anggaran 2017
6.	Perda Nomor 6 Tahun 2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

2) Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti selama tahun 2017 sebanyak 82 sebagai berikut.

1. Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
2. Keputusan DPRD No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
3. Keputusan DPRD No. 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pansus Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota

Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

5. Keputusan DPRD No. 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Revisi Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta.
6. Keputusan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Guru Honorer (K-2).
7. Keputusan DPRD No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penataan Pelabuhan Muara Angke.
8. Keputusan DPRD No. 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pansus Penyusunan Inventarisasi Hasil Laporan masa reses pertama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan DPRD No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapemperda DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
10. Keputusan DPRD No. 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pembahasan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
11. Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2016 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
12. Keputusan DPRD No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.

13. Keputusan DPRD No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014/2019.
14. Keputusan DPRD No. 14 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penjualan dan Penghapusan tanah dan konstruksi jalan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
15. Keputusan DPRD No. 15 Tahun 2017 tentang Pengumuman dan Penetapan DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pemberhentian Sdr. Basuki Purnama, MM dari jabatannya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2012-2017.
16. Keputusan DPRD No. 16 Tahun 2017 tentang Pengumuman dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Sdr. Djarot Saiful Hidayat Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2012-2017.
17. Keputusan DPRD No. 17 Tahun 2017 tentang Pansus Penyusunan Revisi Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta.
18. Keputusan DPRD No. 18 Tahun 2017 tentang Pansus Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
19. Keputusan DPRD No. 19 Tahun 2017 tentang Panitia Khusus Penataan Pelabuhan Muara Angke.
20. Keputusan DPRD No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2019.
21. Keputusan DPRD No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 26 Tahun 2014 tentang

Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta.

22. Keputusan DPRD No. 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
23. Keputusan DPRD No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan DPRD No. 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
24. Keputusan DPRD No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD No. 35 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
25. Keputusan DPRD No. 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan atas Atlet Berprestasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016/2017.
26. Keputusan DPRD No. 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Rafid Topan Sucipto, atlet berprestasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016/2017.
27. Keputusan DPRD No. 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelajar Berprestasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2016/2017.
28. Keputusan DPRD No. 28 Tahun 2017 tentang Pertimbangan terhadap Sdr. Husaen Murad, M.Si NIP 196007271981031004/069882 Pangkat: Pembina Muda (IV/C) Sebagai Calon Walikota Jakarta Utara.
29. Keputusan DPRD No. 29 Tahun 2017 tentang Pertimbangan terhadap Sdr. Drs. Irmansyah, M.Si NIP 196601121987101001/ 115141 Pembina Utama Muda (IV/C) Sebagai calon Bupati Kabupaten Kepulauan seribu.

30. Keputusan DPRD No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
31. Keputusan DPRD No. 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
32. Keputusan DPRD No. 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
33. Keputusan DPRD No. 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
34. Keputusan DPRD No. 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
35. Keputusan DPRD No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan keenambelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
36. Keputusan DPRD No. 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Inventarisasi Hasil Laporan Masa Reses Kedua

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

37. Keputusan DPRD No. 37 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Usulan Rancangan Peraturan daerah tentang Hak-Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
38. Keputusan DPRD No. 38 tahun 2017 tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
39. Keputusan DPRD No. 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2019
40. Keputusan DPRD No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jkt Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
41. Keputusan DPRD No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
42. Keputusan DPRD No. 42 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
43. Keputusan DPRD No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Panitia Khusus Penyusunan Revisi Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

44. Keputusan DPRD No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Panitia Khusus Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
45. Keputusan DPRD No. 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pansus Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas laporan Keuangan Pemda Provinsi DKI Jakarta TA 2016.
46. Keputusan DPRD No. 46 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Penjualan dan Penghapusan Tanah dan Konstruksi Jalan Milik Pemprov. DKI Jakarta.
47. Keputusan DPRD No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
48. Keputusan DPRD No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
49. Keputusan DPRD No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
50. Keputusan DPRD No. 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
51. Keputusan DPRD No. 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-

Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.

52. Perubahan Penugasan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Sebagai Koordinator Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
53. Perubahan Keempatbelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
54. Perubahan keempatbelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
55. Perubahan Keempatbelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
56. Perubahan keempatbelas atas Keputusan 26 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
57. PerubahanKeempatbelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
58. Perubahan Ketigabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
59. Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Pembiayaan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara (Koridor Lebak Bulus-Kampung Bandan).

60. Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Kearsipan Daerah.
61. Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
62. Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
63. Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap LKPJ AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2013-2017.
64. Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
65. Penetapan kembali Pansus Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
66. Perubahan Kelimabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
67. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempatbelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
68. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Hasil Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
69. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenambelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta.
70. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2020.

71. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Guru Honorer (K-2)
72. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2017 Panitia Khusus Penataan Pelabuhan Muara Angke.
73. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 Pembentukan Pansus Penyusun Inventarisasi Hasil Laporan Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2017.
74. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2017
75. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Masa Jabatan 2014-2019.
76. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2017 tentang Perubahan Keenambelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
77. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 tahun 2017 tentang Perubahan Kelimabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019.
78. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelimabelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda Tahun 2014-2019.
79. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Penjualan dan

Penghapusan Tanah dan konstruksi Jalan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

80. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tahun Jamak
81. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Raperda tentang APBD TA 2018
82. Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempatbelas atas Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2019

d. Kepegawaian dan Perangkat Daerah

- Jumlah PNS Provinsi tahun 2017 sebanyak 69.540 orang, jumlah penduduk provinsi tahun 2017 sebanyak 10.271.026 jiwa orang sehingga rasionya hanya 0,67 %.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dikelola oleh BKD dan diintegrasikan oleh Dinas Kominfomas.

Sistem Informasi Website BKD

Sistem Informasi Dokumen ASN

Etkd

E-Absensi

- Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta ketentuan lain, jumlah SKPD di DKI Jakarta sebanyak 42 SKPD Adapun rincian SKPD tersebut sebagai berikut.

- | | |
|--------------|-----------|
| a) Setda | = 1 unit |
| b) Setwan | = 1 unit |
| c) Dinas | = 22 unit |
| d) Badan | = 9 unit |
| e) Satpol PP | = 1 unit |

f) Inspektorat	= 1 unit
g) Kota/Kabupaten	= 6 unit
h) BPBJ	= 1 unit
Jumlah SKPD	= 42 unit

e. Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 mencapai 102,59% dari target penerimaan Rp62.517.744.026.535,00 yaitu sebesar Rp 64.134.650.084.341,00. Realisasi APBD selengkapny sebagaimana pada berikut :

Tabel 3.197
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun anggaran 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6 (4-3)
A.	PENDAPATAN				
1.	Pendapatan Asli Daerah	41.687.387.826.535	43.211.576.966.867	103,66	1.524.189.140.332
2.	Penerimaan Dana Perimbangan	18.696.340.600.000	18.969.291.389.929	101,46	272.950.789.929
3.	Lain-lain Pendapatan Yg Sah	2.134.015.600.000	1.953.781.727.545	91,55	(180.233.872.455)
	Jumlah	62.517.744.026.535	64.134.650.084.341	102,59	1.616.906.057.806
B	BELANJA				
1.	Belanja Tidak Langsung	26.708.540.310.510	23.737.820.730.868	88,88	(2.970.719.579.642)
	Belanja Pegawai	19.640.211.893.000	17.624.803.218.832	89,74	(2.015.408.674.168)
	Belanja Bunga	35.556.257.523	31.897.471.844	89,71	(3.658.785.679)
	Belanja Subsidi	1.921.329.347.884	1.405.914.619.150	73,17	(515.414.728.734)
	Belanja Hibah	1.472.760.030.329	1.112.365.070.388	75,53	(360.394.959.941)
	Belanja Bantuan Sosial	3.233.845.700.000	3.202.680.640.000	99,04	(31.165.060.000)
	Belanja Bantuan Keuangan	364.722.770.000	344.121.138.120	94,35	(20.601.631.880)
	Belanja Tidak Terduga	40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	(24.075.739.240)
2.	Belanja Langsung	35.113.382.689.970	27.305.210.224.908	77,76	(7.808.172.465.062)
	Belanja Pegawai	2.965.911.882.863	2.617.541.723.910	88,25	(348.370.158.953)
	Belanja Barang	16.737.239.960.178	13.642.726.936.711	81,51	(3.094.513.023.467)

	dan Jasa				
	Belanja Modal	15.410.230.846.929	11.044.941.564.287	71,67	(4.365.289.282.642)
	Belanja Daerah	61.821.923.000.480	51.043.030.955.776	82,56	(10.778.892.044.704)
C	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan Pembiayaan	9.305.831.336.723	8.711.993.859.301	93,62	(593.837.477.422)
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.001.652.362.778	9.306.035.109.480	93,04	(695.617.253.298)
	SILPA		12.497.577.878.386		
	APBD	71.823.575.363.258			

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

Beberapa catatan perbandingan mengenai Pengelolaan APBD 2009 – 2017.

1) Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017 sebesar 45,60% dari Total Belanja APBD sebesar Rp71.823.575.363.258,00 dengan rincian urusan sebagai berikut.

a)	Pendidikan	:	Rp	16.141.157.875.422
b)	Kesehatan	:	Rp	7.742.068.966.104
c)	Lingkungan Hidup	:	Rp	1.499.854.725.118
d)	Pekerjaan Umum	:	Rp	6.251.226.828.086
e)	Sosial	:	Rp	473.540.365.771
f)	Tenaga Kerja	:	Rp	251.477.554.300
g)	Koperasi	:	Rp	165.648.999.166
h)	Kependudukan	:	Rp	228.629.365.749
	JUMLAH		Rp	32.753.604.679.716

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja Pelayanan Dasar (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915	11.048.332.574.481	46,83
2.	2010	26.230.179.402.534	16.932.092.883.059	64,55
3.	2011	30.922.361.719.302	18.808.451.255.551	60,82
4.	2012	38.366.680.073.841	23.338.180.860.638	60,83
5.	2013	46.578.865.629.904	27.934.010.981.312	55,58
6.	2014	63.650.106.383.473	41.197.378.678.186	56,51
7.	2015	59.685.552.609.233	35.222.678.096.291	59,01
8.	2016	57.365.040.315.366	34.176.307.037.448	59,58
9.	2017	71.823.575.363.258	32.753.604.679.716	45,60

2) Perbandingan anggaran urusan Pendidikan dan Kesehatan dengan Belanja APBD

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja Pendidikan dan Kesehatan (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	4.495.864.834.280,00	19,05
2.	2010	26.230.179.402.534,33	9.744.036.094.493,00	37,15
3.	2011	30.922.361.719.302,38	10.992.713.098.079,00	35,55
4.	2012	38.366.680.073.841,00	13.670.019.206.941,00	35,63
5.	2013	46.578.865.629.904,00	17.690.186.749.728,00	35,19
6.	2014	63.650.106.383.473,00	23.701.439.743.152,00	37,24
7.	2015	59.685.552.609.233,00	17.812.809.848.664,00	29,84
8.	2016	57.365.040.315.366,00	19.910.170.330.365,00	34,71
9.	2017	71.823.575.363.258,00	23.883.226.841.526,00	33,25

3) Dana Perimbangan yang terserap Tahun 2009-2017

No	Tahun	Alokasi Dana Perimbangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2009	9.008.400.000.000,00	8.650.835.929.772,00	96,03
2.	2010	10.006.090.000.000,00	9.537.609.058.087,00	95,32
3.	2011	8.658.411.159.801,00	9.149.708.963.289,00	105,67
4.	2012	9.776.877.857.000,00	11.554.964.807.804,00	118,19
5.	2013	10.547.537.223.090,00	9.387.539.401.653,00	89,00
6.	2014	17.770.000.000.000,00	9.677.533.225.272,00	54,46
7.	2015	12.995.465.925.000,00	5.887.267.644.697,00	45,30
8.	2016	15.990.368.025.994,00	15.271.661.452.714,00	95,51
9.	2017	18.696.340.600.000,00	18.969.291.389.929,00	101,46

• DAU yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2017

No	Tahun	APBD (Rp)	DAU (Rp)	%
1.	2009	19.371.835.508.395,00	0,00	0,00
2.	2010	22.963.351.075.250,00	0,00	0,00
3.	2011	26.845.693.060.531,00	209.909.442.000,00	0,78
4.	2012	33.650.011.958.617,00	275.327.857.000,00	0,82
5.	2013	40.799.864.826.912,00	299.182.466.000,00	0,73
6.	2014	65.042.099.407.000,00	85.985.282.000,00	0,13
7.	2015	56.309.238.000.000,00	0,00	~
8.	2016	57.161.248.465.732,00	0,00	~
9.	2017	0,00	0,00	0,00

• Perbandingan belanja langsung APBD dari Total Belanja

APBD Tahun 2009-2017

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	16.763.570.859.733,00	71,05
2.	2010	26.230.179.402.534,33	17.551.732.922.015,00	66,91
3.	2011	30.922.361.719.302,38	16.796.252.566.473,00	54,32
4.	2012	38.366.680.073.841,00	19.885.620.794.407,00	51,83
5.	2013	46.578.865.629.904,00	31.609.905.465.946,00	67,86
6.	2014	63.650.106.383.473,00	46.524.935.359.879,00	73,09
7.	2015	59.685.552.609.233,00	22.325.834.524.849,00	37,41
8.	2016	57.365.040.315.366,00	31.004.340.790.717,00	54,05
9.	2017	71.823.575.363.258,00	35.113.382.689.970,00	48,89

- Rencana PAD APBD Tahun 2017 sebesar Rp41.687.387.826.535,00 atau 66,68% dari Total Rencana Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp62.517.744.026.535,00

No	Tahun	APBD (Rp)	TARGET PAD (Rp)	%
1.	2009	19.371.835.508.395,00	10.363.435.508.395,00	53,50
2.	2010	22.963.351.075.250,00	12.315.398.272.250,00	53,63
3.	2011	26.845.693.060.531,00	16.280.133.657.370,00	60,64
4.	2012	33.650.011.958.617,00	20.523.433.370.351,00	60,99
5.	2013	40.799.864.826.912,00	26.304.097.561.000,00	64,47
6.	2014	65.042.099.407.000,00	39.757.308.437.000,00	61,13
7.	2015	56.309.238.000.000,00	37.965.616.304.000,00	67,42
8.	2016	57.161.248.465.732,00	38.501.784.839.738,00	67,35
9.	2017	62.517.744.026.535,00	41.687.387.826.535,00	66,68

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009-2017 dengan opini WDP.

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1.	2009	WDP	-
2.	2010	WDP	-
3.	2011	WTP	-
4.	2012	WTP	-
5.	2013	WDP	-
6.	2014	WDP	-
7.	2015	WDP	-
8.	2016	WDP	-
9.	2017	-	Belum terdapat penilaian

- SILPA Tahun 2009-2017.

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	4.446.373.058.586,11	18,84
2.	2010	26.230.179.402.534,33	3.748.512.147.298,33	14,29
3.	2011	30.922.361.719.302,38	4.911.196.018.129,38	15,88
4.	2012	38.366.680.073.841,00	6.470.618.490.508,20	16,87
5.	2013	46.578.865.629.904,00	9.463.721.530.814,00	20,32
6.	2014	63.650.106.383.473,00	7.593.994.776.473,00	11,93
7.	2015	59.685.552.609.233,00	9.160.897.609.233,00	15,35
8.	2016	57.365.040.315.366,00	7.688.315.869.811,00	13,40
9.	2017	71.823.575.363.258,00	12.497.577.878.386,00	17,40

- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp43.211.576.966.867,00 atau 67,38% dari Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp64.134.650.084.341,00

No	Tahun	APBD (Rp)	PAD (Rp)	%
1.	2009	19.371.835.508.395,00	10.601.057.958.783,30	54,72
2.	2010	22.963.351.075.250,00	12.315.398.272.250,00	53,63
3.	2011	26.845.693.060.531,00	17.825.987.294.430,80	66,40
4.	2012	33.650.011.958.617,00	22.091.077.374.004,03	65,65
5.	2013	40.799.864.826.912,00	26.849.324.753.236,00	65,81
6.	2014	65.042.099.407.000,00	31.277.329.814.932,00	48,09
7.	2015	56.309.238.000.000,00	33.690.978.069.694,00	59,83
8.	2016	57.161.248.465.732,00	37.153.774.645.542,20	64,99
9.	2017	64.134.650.084.341,00	43.211.576.966.867,00	67,38

- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp51.043.030.955.776,00 atau 82,56% dari Total Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp61.821.923.000.480,00.

No	Tahun	APBD (Rp)	Belanja (Rp)	%
1.	2009	23.594.857.431.915,00	19.511.099.430.822,10	82,69
2.	2010	26.230.179.402.534,33	21.552.895.838.935,00	82,17
3.	2011	30.922.361.719.302,38	26.423.599.893.297,00	85,45
4.	2012	38.366.680.073.841,00	31.609.017.861.145,00	82,39
5.	2013	46.578.865.629.904,00	38.294.384.858.471,00	82,21
6.	2014	63.650.106.383.473,00	37.764.668.506.957,00	59,33
7.	2015	59.685.552.609.233,00	43.037.809.732.739,00	72,11
8.	2016	57.365.040.315.366,00	47.155.845.569.881,00	82,20

9.	2017	61.821.923.000.480,00	51.043.030.955.776,00	82,56
----	------	-----------------------	-----------------------	-------

• Realisasi PAD 2009-2017

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1.	2009	10.363.435.508.395,00	10.601.057.958.783,30	102,29
2.	2010	12.315.398.272.250,00	12.891.992.182.041,05	104,68
3.	2011	16.280.133.657.370,00	17.825.987.294.430,80	109,50
4.	2012	20.523.433.370.351,00	22.091.077.374.004,03	107,64
5.	2013	26.304.097.561.000,00	26,849,324,753,236,00	102,07
6.	2014	39.757.308.437.000,00	31.277.329.814.932,00	78,67
7.	2015	37.965.616.304.000,00	33.690.978.069.694,00	88,74
8.	2016	38.501.784.839.738,00	37.153.774.645.542,20	96,50
9.	2017	41.687.387.826.535,00	43.211.576.966.867,00	103,66

• Perkembangan PAD Tahun 2009-2017

No	Tahun	Nilai Realisasi PAD (Rp)	Kenaikan (%)	Keterangan
1.	2009	10.608.032.178.408,20	1,46	
2.	2010	12.891.992.182.041,05	21,53	
3.	2011	17.825.987.294.430,80	38,27	
4.	2012	22.091.104.415.443,00	23,93	
5.	2013	26,849,324,753,236,00	21,54	
6.	2014	31.277.329.814.932,00	16,49	
7.	2015	33.690.978.069.694,00	7,72	
8.	2016	37.153.774.645.542,20	10,28	
9.	2017	43.211.576.966.867,00	16,30	

f. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdiri dari beberapa SKPD yaitu:

- 3) Sekretariat Daerah terdiri dari (1) Biro Tata Pemerintahan, (2) Biro Organisasi dan Tatalaksana, (3) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, (4) Biro Hukum, (5) Biro Perekonomian, (6) Biro Umum, (7) Biro Administrasi dan Keuangan Aset Setda, (8) Biro Kesejahteraan Sosial, (9) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, (10) Biro

Pendidikan dan Mental Spiritual)

- 4) Inspektorat
- 3) Kota/kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
- 4) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
- 5) Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)
- 6) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- 7) Badan Pembinaan dan Sumber Daya Manusia
- 8) Badan Pengadaan Barang dan Jasa
- 9) Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- 10) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja
- 12) Sekretariat DPRD
- 13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.198 Rekapitulasi Pegawai Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

No	Kualifikasi	SKPD/UKPD(Dinas/Badan/Kota/Kabupaten)													
		Setda	Insp	Wilayah	BPKD	BKD	BPSD M	BPRD	DPKP	Satpol	Setwan	BPBD	BPTSP	BPBJ	BPAD
A.	Golongan	852	258	4600	299	277	115	791	2.755	3232	139	70	1.287	150	300
	1. Gol. IV	109	55	305	24	27	38	87	14	35	9	20	43	17	25
	2. Gol. III	507	187	3351	226	197	59	530	717	531	81	45	1.008	127	196
	3. Gol. II	234	18	895	47	52	14	169	2063	2586	48	20	236	6	66
	4. Gol. I	2	3	49	2	1	4	5	12	80	1	0	-	0	13
B.	Eselon	854	258	4600	299	277	115	791	2.755	3232	139	70	1.287	150	52
	1. Eselon I	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
	2. Eselon II	23	0	18	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
	3. Eselon III	40	12	178	12	13	6	58	13	12	4	11	53	2	12
	4. Eselon IV	117	10	1718	39	39	13	84	91	87	12	29	333	16	39
	5. Eselon V		0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	6. Fungsional	7	109	4	0	11	35	0	1	2	1	0	-	0	-
	7. Pelaksana	663	125	2682	247	213	60	648	2700	3129	122	44	895	131	-
C.	Pendidikan	852	258	4600	299	277	115	791	2.755	3232	139	70	1.287	150	-
	1. S3	6	0	2	1	1	3	0	1	0	-	0	1	0	-

No	Kualifikasi	SKPD/UKPD(Dinas/Badan/Kota/Kabupaten)													
		Setda	Insp	Wilayah	BPKD	BKD	BPSD M	BPRD	DPKP	Satpol	Setwan	BPBD	BPTSP	BPBJ	BPAD
	2. S2	110	56	398	21	38	45	121	31	36	14	18	33	18	37
	3. S1	248	146	1.658	171	123	36	436	297	414	55	59	1.089	99	108
	4. Diploma	39	17	469	46	29	9	139	16	26	1	8	83	12	17
	5. SLTA	413	31	1871	56	82	17	89	2427	2565	61	9	80	21	118
	6. SLTP	23	3	134	2	2	4	5	29	174	4	0	1	0	18
	7. SD	13	3	68	2	2	1	1	2	17	4	0	-	0	2

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta , 2017

Pejabat pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.199 Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Setda	-	-	-	-	-
	Eselon I	5	4	4		4
	Eselon II	23	23	23		23
	Eselon III	40	40	40		40
	Eselon IV	117	117	117		117
	Jumlah	185	184	184		184
2	Inspektorat					
	Eselon II	1	0	0	0	0
	Eselon III	12	12	12	12	12
	Eselon IV	10	10	10	0	10
	Jumlah	23	22	22	12	22
	Walikota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	27	27	27	20	27
	Eselon IV	292	285	285	247	278
	Jumlah	322	315	315	270	308
	Walikota Jakarta Barat					
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	27	27	27	27	27
	Eselon IV	350	350	350	350	350
	Jumlah	380	380	380	380	380
	Kepulauan seribu					
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	12	12	12	11	9
	Eselon IV	60	60	60	18	51
	Jumlah	75	75	75	32	63

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	Walikota Jakarta Timur					
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	31	30	30	21	30
	Eselon IV	409	408	371	227	408
	Jumlah	443	441	404	251	441
	Walikota Jakarta Utara					
	Eselon II	3	3	3	0	3
	Eselon III	23	23	23	12	23
	Eselon IV	215	212	214	47	215
	Jumlah	241	238	240	59	241
	Walikota Jakarta Selatan					
	Eselon II	3	3	3	3	3
	Eselon III	31	29	29	21	29
	Eselon IV	417	415	229	196	415
	Jumlah	451	447	261	220	447
4	BPKD					
	Eselon II	2	1	1	1	1
	Eselon III	12	12	21	21	21
	Eselon IV	39	39	90	90	90
	Jumlah	52	51	113	113	113
5	BKD					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III	13	13	13	13	13
	Eselon IV	39	39	39	39	39
	Jumlah	53	53	53	53	53
6	BPSDM					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III	6	6	6	6	6
	Eselon IV	13	13	8	2	8
	Jumlah	20	20			
7.	BPRD					
	Eselon II	2	1	1	1	1
	Eselon III	59	58	58	58	58

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	Eselon IV	84	84	84	84	84
	Jumlah	145	143	143	143	143
8	DPKP					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III	14	12	12	11	12
	Eselon IV	91	90	90	60	90
	Jumlah	106	103	103	72	103
9	Satpol PP					
	Eselon II	2	2	1	1	1
	Eselon III	12	12	12	5	11
	Eselon IV	97	87	79	16	80
	Jumlah	111	101	92	22	92
10	Setwan					
	Eselon II	1	1	1	-	1
	Eselon III	4	4	4	3	4
	Eselon IV	12	12	12	4	12
	Jumlah	17	17	17	7	17
11	BPAD					
	Eselon II	1	1	1	1	1
	Eselon III	12	11	11	11	11
	Eselon IV	39	39	39	39	39
	Jumlah	52	51	51	51	51
12	BPBD					
	Eselon II	1	1	1		1
	Eselon III	11	11	11		11
	Eselon IV	29	29	29		29
	Jumlah	41	41	41		41
13	BPTSP					
	Eselon II	2	2	2	2	2
	Eselon III	54	54	54	4	54
	Eselon IV	336	336	336	25	336
	Jumlah	392	392	392	31	392
14	BPBJ					
	Eselon II	1	1	1	0	1
	Eselon III	9	7	7	1	5
	Eselon IV	16	16	16	7	16
	Jumlah	26	24	24	8	22

Sumber : BKD dan SKPD, 2017

g. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran SKPD penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian. sebagaimana pada berikut

Tabel 3.200
Rekapitulasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	9,831,069,667,083	8,759,595,992,505	89.10
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,846,194,881,317	5,434,564,658,308	
2. BELANJA LANGSUNG	3,984,874,785,766	3,325,031,334,197	
a. BELANJA PEGAWAI	325,061,624,336	292,022,491,270	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	3,369,576,191,661	2,824,446,236,491	
- Belanja Pemeliharaan	140,173,623,505	87,981,795,135	
c. BELANJA MODAL	290,236,969,769	208,562,606,436	
CATATAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : BELANJA APBD	9,831,069,667,083	61,821,923,000,480	59,57
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	208,562,606,436	8,759,595,992,505	0,67
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	87,981,795,135	2,824,446,236,491	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	87,981,795,135	8,759,595,992,505	

Sumber : LKPD 2017 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

h. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.201 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Urusan Otonomi DaerahPemerintahan Umum. Administrasi
Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan
Persandian**

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	SKPD														Jumlah
		Setda	Insp	Wilayah	BPKD	BKD	BPSPM	BPRD	DPKP	Satpol	Setwan	BPAD	BPBD	BPTSP	BPPBJ	
1.	Papan Pengumuman	2	2	21	14	2	1	2	6	1	11	-	4	75	8	137
2.	Kotak Pengaduan	-	1	11		1	-	1	6	-	-	1	1	318	-	338
3.	Leaflet	1	-	,			1	7	1	-	-	-	-	318	-	328
4.	Mobil Keliling	-	-	9			-	5		-	-	-	-	3	-	23
5.	Media Masa	-	-				-	4	1	-	1	-	-	2	-	8
6.	Website	1	1	3		1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	14
7.	E-mail	1	2	20	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	32
8.	Call Center	1	-	6			-	2	-	-	-	1	-	1	-	11

Sumber : SKPD/UKPD Prov. DKI Jakarta

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : BPKD : <http://bpkd.jakarta.go.id>
BKD : <http://bkddki.jakarta.go.id>
Inspektorat : <http://inspektorat.jakarta.go.id>
BPAD : <http://bpad.jakarta.go.id>
BPBD : <http://bpbd.jakarta.go.id>
Biro Hukum : <http://jdih.jakarta.go.id>
Walikota Jakarta Pusat : <http://pusat.jakarta.go.id>
- E-mail : Inspektorat : inspektorat@jakarta.go.id
BPPBJ : subbagpak.bppbj@jakarta.go.id
Biro Ortala : ortla_dki@yahoo.com
BKD : bkdprov@jakarta.go.id
Biro tapem : karo_tatapemerintahan@jakarta.go.id
Biro Dikmental : biro_pms@yahoo.co.id
: biro.dikmental@gmail.com
Biro Kesos : birokesos2009@gmail.com
Biro Hukum : birohukum@jakarta.go.id
Biro Administrasi : anggaransetda@yahoo.co.id
: tu.biroaka@gmail.com

Biro Hukum : <http://Jakarta.go.id/birohukum>
 Sekko Jakpus : sekko_jp@jakarta.go.id
 Kabag Tapem Jakpus : kabag_tapemjp@jakarta.go.id
 Kec. Gambir : camat_gambir@jakarta.go.id
 Sekko Jakbar : sekko_jb@jakarta.go.id
 Kabag Tapem Jakbar : kabag_tapemjb@jakarta.go.id
 Kec. Cengkareng : camat_cengkareng@jakarta.go.id
 Sekkab Kep. Seribu : sekkab_ks@jakarta.go.id
 Kabag Tapem KS : kabag_tapemks@jakarta.go.id
 Kec. Kep. Seibu Utr : camat_seribuutara@jakarta.go.id
 Penataan Kota dan LH Jt : penataankota.jt@jakarta.go.id

Dilhat dari sarana gedung, Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tingkat provinsi semuanya berkantor di Blok G Balaikota DKI Jakarta, kecuali Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Dinas Pelayanan Pajak yang menggunakan gedung tersendiri.

Sarana dan prasarana lainnya yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.

i. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian dilakukan melalui Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah. Musrenbang tersebut bertujuan menyelaraskan usulan kegiatan dari setiap SKPD (RKA/Renja SKPD) dengan Program Daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Tabel 3.202
**Sikronisasi Perencanaan Program Otonomi Daerah Pemerintahan
 Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
 Kepegawaian, dan Persandian**

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	Setda			
	• RKPD 2017	33	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	33	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	33	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	33		
2	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta			
	• RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	4	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	4		
3.	5 Wilayah Kota + 1 Kab			
	• RKPD 2017	155	RKPD : RENJA SKPD	
	• NRENJA SKPD 2017	163	RENJA SKPD : RKA	
	• RKA 2017	155	RKA : DPA	
	• DPA 2017	163		
	Walikota Jakarta Timur			
	• RKPD 2017	11	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	10	RENJA SKPD : RKA	90,90
	• RKA 2017	11	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	11		
	Walikota Jakarta Pusat			
	• RKPD 2017	9	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	9	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	9	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	9	RKPD : RENJA SKPD	100
	Walikota Jakarta Utara			
	• RKPD 2017	9	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	9	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	9	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	9		

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
	Walikota Jakarta Barat			
	• RKPD 2017	8	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	8	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	8	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	8		
	Walikota Jakarta Selatan			
	• RKPD 2017	14	RKPD : RENJA SKPD	90
	• RENJA SKPD 2017	13	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	13	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	13		
	Kepulauan Seribu			
	• RKPD 2017	35	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	35	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	35	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	35		
4.	BPKD			
	• RKPD 2017	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	5	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	5		
5.	BKD			
	• RKPD 2017	8	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	8	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	8	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	8		
6.	BPSDM			
	• RKPD 2017	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	5	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	5		
7.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah			
	• RKPD 2017	6	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKA	100

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
	• RKA 2017	6	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	6		100
8	DPKP			
	• RKPD 2017	6	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	6	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	6		
9.	Satpol PP			
	• RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	4	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	4		
10.	Sekretariat DPRD			
	• RKPD 2017	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	5	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	5		
11.	BPAD			
	• RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	4	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	4		
12.	BPBD			
	• RKPD 2017	3	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	3	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	3	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	3		
13	BPTSP			
	• RKPD 2017	42	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2017	42	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	42	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	42		
14	BPPBJ			
	• RKPD 2017	2	RKPD : RENJA SKPD	100

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
	• RENJA SKPD 2017	2	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2017	2	RKA : DPA	100
	• DPA 2017	2		100

Sumber : SKPD/UKPD Prov. DKI Jakarta 2017

j. Permasalahan dan solusi

Dilihat dari kondisi geografi, demografi, sosial maupun kedudukan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, ada beberapa potensi yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta rawan bencana antara lain :

- 1) Sebagai daerah pantai, bencana mungkin datang dari laut seperti adanya banjir pasang air laut, tsunami dan erosi pantai (abrasi).
- 2) Sebagai muara dari 13 sungai, potensi bencana berupa banjir, pencemaran air dan sampah yang terbawa dari daerah hulu.
- 3) Sebagai daerah yang padat penduduk, bencana yang potensial terjadi seperti kebakaran, bangunan runtuh, bencana transportasi dan wabah penyakit.
- 4) Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki potensi menjadi tempat pelaku kejahatan nasional maupun internasional, seperti kegiatan terorisme, perdagangan narkoba dan lain-lain.

Dari beberapa potensi tersebut, terdapat kejadian bencana kebakaran dan operasi penyelamatan yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan intensitas/frekuensinya cukup tinggi

Upaya pencegahan bencana kebakaran pada tahun 2017 antara lain dilakukan dengan :

- 1) Pendayagunaan Bantuan Sukarela Kebakaran (Balakar) pada saat penanggulangan kebakaran
- 2) Kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) Pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk akses mobil Penanggulangan Kebakaran, sumber air dan tempat berkumpul untuk kepentingan rencana operasional kebakaran.

- 4) Pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- 5) Pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan.
- 6) Sosialisasi pengamanan rumah, gedung dan bangunan dari bahaya kebakaran.
- 7) Pelatihan dan simulasi penyelamatan jika terjadi kebakaran bagi masyarakat maupun pengguna gedung perkantoran.
- 8) Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas petugas Penanggulangan Kebakaran dan sistem pengamanan kebakaran.
- 9) Pengawasan dan pengendalian tata cara menyimpan dan menggunakan serta mengangkut barang mudah terbakar dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3).
- 10) Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan penanggulangan.
- 11) Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2008

Antisipasi Bencana banjir

- 1) Upaya struktural berupa :
 - a) Relokasi Pemukiman dibantaran kali
 - b) Pengerukan kali / saluran / drainase
 - c) Penyelesaian sistem pompa dan pembangunan *long storage*
 - d) Pemeliharaan dan pembersihan saluran/kali
 - e) Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk menangani genangan di jalan arteri dan kolektor
- 2) Upaya non struktural berupa :
 - a) Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan.
 - b) Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat.
 - c) Membangun dan memfungsikan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan fungsi pintu air sebagai indikator tingkat kesiagaan banjir, seperti pintu air Katulampa, Depok dan Manggarai.
 - d) Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.
 - e) Sinkronisasi perencanaan tata ruang di kawasan Jabodetabekjur.

k. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.203
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2.	Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta
4.	Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah
5.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
6.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Pergub Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pergub Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 225 tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Pergub Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu
10.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pergub Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Akhir Tahun 2017
11.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota	Pergub Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota
12.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau	Pergub Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau
13.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Pergub Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar
14.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintahan	Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pergub Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang Berasal dari Perolehan lainnya yang Sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak	Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Daerah	
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan	Pergub Nomor 52 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Kedua tahun 2017
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.	Pergub Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit
19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	Pergub Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
20.	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Pergub Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017	Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun Pajak 2017 untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2017.
22.	UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	Pergub Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian
23.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2016	Pergub Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan sertifikasi Ketenagalistrikan
24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Pergub Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara
25.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan	Pergub Nomor 95 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Integrasi Dsitrict8, Kawasana Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Metropolitan Jakarta

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009	Raya
26.	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pergub Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pergub Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
28.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Pergub Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
29.	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pergub Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Jual Beli dan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Penjualan.
30.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pergub Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi
31.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 tahun 2017 tentang Penetapan Pencontohan Mal Pelayanan Publik.	Pergub Nomor 142 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik
32.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	Pergub Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018
33.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016	Pergub Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas
34.	Peraturan Komisi	Surat Edaran Nomor 8/SE/2017

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016	tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017
35.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Desember Tahun Anggaran 2016
36.	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2016	Surat Edaran Nomor 10/SE/2017 tentang Perhitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
37.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014	Keputusan Gubernur Nomor 721 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
38.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas
39.	Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2017	Instruksi Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelayanan Masyarakat pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017
40.	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016	Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran e-LHKPN
41.	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015	Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pemberian Uang Duka Wafat Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan dan Keluarganya
42.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017	Keputusan Gubernur Nomor 911 Tahun 2017 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2017 M/ 1438 H
43.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005	Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
44.	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015	Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2010

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan dalam Menjalankan Tugas
45.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005	Keputusan Gubernur Nomor 956 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Struktural yang Telah Menyelesaikan Masa Bhakti
46.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2013	Keputusan Gubernur Nomor 1017 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
47.	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016	Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
48.	Undang-Undang No. 29 Tahun 2007	Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap
49.	Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Mei 2017 No. B/21/M.KT.02/2017	Surat Edaran Nomor 22/SE/2017 tentang Penundaan Cuti Tahunan Bagi Pegawai Negeri Sipil Sebelum atau Setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H/ 2017 M
50.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2017	Keputusan Gubernur Nomor 1180 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/ atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Gubernur, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017
51.	Undang-Undang No. 29 Tahun 2007	Keputusan Gubernur Nomor 1179 Tahun 2017 tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017
52.	Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017	Surat Edaran Nomor 25/SE/2017 tentang Cuti Tahunan dan Cuti Bersama Tahun 2017
53.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017	Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja
54.	Surat Menteri Pendayagunaan	Instruksi Gubernur Nomor 114 Tahun

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 15 Agustus 2016 No. B/2810/M.PAN-RB/08//2016	2017 tentang Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2016
55.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017	Instruksi Gubernur Nomor 134 Tahun 2017 tentang Laporan Penahanan dan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang Disangka/Didakwa/Dipidana
56.	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014	Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian
57.	Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1986	Instruksi Gubernur Nomor 153 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Tahun 2017
58.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016	PERGUB Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber : Biro Hukum Setda Prov.DKI Jakarta 2017

Penghargaan :

1. Penghargaan dari Ombudsman yang diberikan oleh Biro ORB yaitu “Predikat Kepatuhan Tinggi” terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Atas 1790 Produk Layanan
2. Penghargaan dari KemenPAN&RB yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”
3. Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan 2017
4. Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Tahun 2017
5. Lomba taman hatinya pkk tingkat nasional tahun 2017
6. Lomba pemuda pelopor bidang pangan tingkat nasional tahun 2017
7. Penghargaan tenaga kesejahteraan sosial berprestasi tingkat nasional tahun 2017
8. Penghargaan mentri hukum dan ham anubhawa sasana kelurahan pengadegan dan kelurahan rawajati tingkat nasional tahun 2017

9. Penghargaan katagori program kampung iklim (proklim) utama tingkat nasional tahun 2017
10. Penghargaan kota adm. Jakarta selatan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) ri katagori parameter kepedulian hak asasi manusia tingkat nasional tahun 2017
11. Penghargaan II Tingkat Nasional sebagai SKPD Binaan dalam Pengelolaan Kearsipan ANRI Tahun 2017
12. Penghargaan Program Kota Peduli HAM Tingkat Nasional dari Menteri Hukum dan HAM Tahun 2017
13. Penghargaan Program Kota Sehat Tingkat Nasional dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Penghargaan berupa KOTA SWASTI SABA WISARA Tahun 2017
14. Penghargaan Sertifikat Adipura untuk Kota Bersih tahun 2017
15. Penghargaan Terminal Pulo Gebang Terbaik Nasional 2017
16. Penghargaan Dwija Praja Nugraha dalam Bidang Pendidikan tahun 2017
17. Penghargaan III tingkat Nasional Lomba CIPTA MENU dalam rangka Hari Pangan Sedunia

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Prioritas urusan

Terdapat 2 Program Prioritas Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (khususnya RT/RW) Tahun 2017 di DKI Jakarta, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Pemebdayaan Masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.204 **Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi**

No	PROGRAM		
	NASIONAL	PROVINSI	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	

2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan	
Jml	3	2

Sumber : BPMP dan KB Prov. DKI Jakarta 2017

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2017 sebanyak 2 (dua) Program dengan 17 (empat belas) kegiatan.

Tabel 3.205
Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Jumlah Sub Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3	3	100
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	14	14	100
Jumlah		17	17	100

Sumber : BPMP dan KB Prov. DKI Jakarta 2017

Pencapaian lain dalam urusan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017, antara lain :

- Diterimanya penghargaan Juara III pada Lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional 2017 diberikan kepada Posyantek Kecamatan Kemayoran.

Tabel 3.206
Rekapitulasi Dana PPMK

No	Uraian	Jumlah (Miliar Rupiah)	
		2014	2015
1	Dana BLM	109	60.150
2	Bina Ekonomi	0	0
3	Bina Sosial dan Fisik	119	53.736
4	Pemanfaat (Org)		49.490
Jumlah			

Sumber : BPMP dan KB Prov DKI Jakarta , 2015

PKK Aktif

No	Uraian	Tahun	
		2015	2017
1	PKK Aktif	196.333	110.724
2	Jml PKK	201.160	146.305
3	%	97,60	76

Sumber : BPMP dan KB Prov DKI Jakarta 2017

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta hanya mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat karena di DKI Jakarta tidak ada Desa (otonom). Urusan ini dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat Kota/kabupaten Administrasi dan secara otomatis juga perangkat Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.207 **Rekapitulasi Pegawai Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	25	
	• Golongan IV	10	
	• Golongan III	15	
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	Eselon	25	
	• Eselon I		
	• Eselon II		
	• Eselon III	1	
	• Eselon IV	9	
	• Fungsional Khusus		
	• Fungsional Umum (Staf)	15	
C.	Pendidikan	25	
	• S3		
	• S2		
	• S1		
	• Diploma		
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : BPMPKB Prov. DKI Jakarta, 2015

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.208
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan
Pemberdayaan Masyarakat

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	3	3	2	2	2
3	Eselon IV	10	10	9	9	9
Jumlah		14	14	12	12	12

Sumber : BPMPKB, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 12/12 100%
- Diklat Kepemimpinan : 12/12 100%
- Kepangkatan : 12/12 100%

d. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp.5.931.895.213,- Anggaran yang terserap sampai 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.533.968.787,- atau 76,43%.

Tabel 3.209
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.931.895.213	4.533.968.787	76,43
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	5.931.895.213	4.533.968.787	76,43
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN :			
- Alokasi Anggaran URUSAN : APBD			
- Belanja Modal : Belanja URUSAN			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

e. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.210
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	0	7
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	0	7
4.	Media Masa	100	50	50	50	50	50	50	0	400
5.	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	E-mail	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber : BPMPKB, 2017

CATATAN PERBANDINGAN :

Website : <http://dkijakarta.bkkbn.go.id/>

f. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat didominasi oleh program *bottom up*, karena kegiatannya sebagian besar berbasis masyarakat.

Usulan kegiatan PPMK yang diajukan oleh Dewan Kelurahan diseleksi oleh BPM Kota/Kabupaten untuk diteliti. Usulan yang disetujui dapat dikeluarkan anggarannya.

Tabel 3.211
Sikronisasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	2	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	2	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	2	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	2		

Sumber : BPMPKB, 2017

g. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- **Permasalahan:**

Kegiatan peningkatan sanitasi masyarakat melalui program sanimas IDB dalam penyerapan anggaran belum maksimal karena membutuhkan lahan dan komitmen masyarakat.

Solusi:

1. Mencari lahan yang memadai
2. Komitmen masyarakat yang tinggi

- **Permasalahan:**

Kegiatan pendampingan kader dan poktan dalam pengembangan penggerakan pemberdayaan keluarga dalam penyerapan anggaran belum maksimal (48,27%), hal ini dikarenakan program kegiatan tersebut sudah terintegrasi di program pemberdayaan RPTRA yang sarannya juga melibatkan Kader-Kader dan POKJA/POKTAN

Solusi:

Di tahun yang akan datang, kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

- **Permasalahan:**

Kegiatan penguatan kelembagaan dan penyebaran informasi PKK dalam penyerapan anggaran belum maksimal (47,72%), hal ini dikarenakan karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur No. 10 Tahun 2015.

Solusi:

Tidak menganggarkan lagi komponen kegiatan yang ada di SE 10.

h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dituangkan dalam Perda dan Peraturan Gubernur antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.212
**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.		Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
		Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Dewan Kelurahan Kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
		Keputusan Gubernur Nomor 869 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bina Fisik dan Bina Sosial Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2010
		Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
		Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
		Peraturan Gubernur No.89/2011 ttg Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		PPMK Th.Anggaran 2001 sd 2007.
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1033/2011 tentang Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2011
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1003/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 760/2013 tentang Tim Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan TA 2013
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 465/2013 tentang Penetapan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemda lain dan Pemerintahan serta partai Politik pada APBD TA 2013
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 12/2012 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Pemerintahan/non-Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada APBD TA 2012
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1407/2011 tentang Alokasi Dana Bina Sosial serta Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) PPMK TA 2011
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1663/2013 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang kepada Individu, Masyarakat, Kelompok masyarakat, Pemda Lainnya, dan Pemerintah serta parpol TA 2013
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 81/2011 tentang

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 55/2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1369/2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Tahap ketiga dalam Bentuk Uang Kepada Individu, keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan pada APBD TA 2014
		Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 696/2014 tentang Penanggung Jawan Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 112/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 46/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 112/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

22. Sosial

a. Prioritas urusan

Adapun prioritas urusan pilihan di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar anak bermasalah sosial, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas
- 2) Penanganan PMKS Jalanan
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi warga binaan sosial (WBS) di panti sosial
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana sosial
- 5) Peningkatan kemandirian keluarga miskin dan PMKS potensial
- 6) Peningkatan kualitas lembaga dan tenaga kesos serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos
- 7) Perlindungan sosial korban bencana

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Sosial yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.213 Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kementerian Sosial	1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Kantor 2. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Sosial 3. Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Sosial 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
2	Program Pemberdayaan Sosial	5. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial 6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Program Rehabilitasi Sosial	7. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8. Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Program Penanggulangan Kemiskinan	• Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
Jml	5	8

Tahun 2017 terdapat 8 program dengan 648 kegiatan pada Urusan Sosial.

Tabel 3.214 Program Urusan Sosial

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial	282
2.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Sosial	6
3.	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Sosial	1
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	198
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial	59
6.	Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	12
7.	Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	22
8.	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial	68
Jumlah		648

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.215 Realisasi Program Urusan Sosial I

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial	282	282	100

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
2.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Sosial	6	6	100
3.	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Sosial	1	1	100
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	198	198	100
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial	59	58	98,31
6.	Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	12	12	100
7.	Program Pelayanan Perlindungan dan	22	22	100
8.	Jaminan Sosial	68	68	100
	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial			
Jumlah		648	647	91,37

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Dalam melaksanakan operasional Urusan Sosial terdapat standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai. Adapun pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2017 adalah :

REALISASI PENCAPAIAN SPM DINAS SOSIAL						
TAHUN ANGGARAN 2017						
No.	SASARAN INDIKATOR SPM BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL TAHUN 2010-2015	POPULASI TARGET	TARGET SPM	REALISASI TAHUN KE-7 (2016)	REALISASI TAHUN 7 (2017)	
				TARGET	VOLUME	CAPAIAN
1	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan sosial dan/ atau UEP/KUBE	323,170	30%	5.00%	500	0.15%
2	Jumlah anak terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak cacat penerima bantuan sosial	12,097	80%	13%	1,119	9%
3	Jumlah bekas narapidana, WTS, pengidap penyakit kronis, waria, korban tindak kekerasan/pekerja migran bermasalah sosial menerima bantuan sosial	3,528	80%	13%	45	1%
4	Jumlah warga binaan sosial yang menerima pelayanan dalam panti sosial	31,010	60%	10%	7,580	24%
5	Jumlah PMKS jalanan yang mendapat perlindungan dan penyaluran sosial pertahun	150,000	60%	10%	8,504	6%
6	Jumlah panti sosial, sasana dan loka bina karya yang direnovasi/dilakukan perawatan	44	80%	13%	33	75%
7	Jumlah panti sosial yang memenuhi SOP panti	22	48%	8%	22	100%
8	Jumlah lembaga sosial yang mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial	536	60%	10%	53	10%
9	Pelayanan sosial penanggulangan korban bencana berupa makanan siap saji	5,000,000	80%	13%	83,045	1.7%
10	Jumlah satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	2,000	80%	13%	1,550	78%
11	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima pelayanan sosial/jaminan sosial	7,411	60%	10%	123	2%
12	Jumlah lanjut usia yang menerima pelayanan sosial/jaminan sosial	9,244	60%	10%	157	2%

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Meningkatnya persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial sebanyak sebanyak 17,7% di tahun 2016 menjadi 19,5% (dari populasi PMKS 38.732 orang) di tahun 2017
2. Menurunnya titik rawan PMKS di DKI Jakarta melalui Pengendalian PMKS jalanan di titik rawan PMKS Jakarta.

Pada tahun 2012 jumlah titik rawan PMKS sebanyak 48 titik rawan, tahun 2013 menjadi 35 titik rawan dan tahun 2014 menjadi 16 titik rawan, tahun 2015 menjadi turun menjadi 13 titik rawan, tahun 2016 tidak ada titik rawan khusus ring 1/zona 1 sesuai Instruksi Gubernur No.53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan tahun 2017 penjagaan pada 48 titik rawan di zona 1 dan pengembangan penjagaan ke 228 titik rawan di zona 2 dan 3.

3. Jumlah gedung panti sosial yang layak sebanyak 22 panti sosial (23 lokasi dari 45 lokasi) pada tahun 2017
4. Meningkatnya gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan sebanyak 87 SKKT di tahun 2016 menjadi 124 SKKT di tahun 2017
5. Terpilihnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapat juara 3, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mendapat juara 3, Organisasi Sosial (Orsos) mendapat juara 2 dan Karang Taruna masuk 7 besar dalam tingkat Provinsi acara Penilaian Pilar-Pilar Sosial di tahun 2017
6. *Respon time* penanggulangan bencana selama 3 jam
7. Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial sebanyak 100%
8. Jumlah Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan mengalami penurunan yang mendapat kesejahteraan sosial sebanyak 174 orang

e. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial 5 wilayah Kota dan 22 Panti Sosial dengan jumlah pegawai sebanyak 753 orang.

Tabel 3.216 Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan		
	1. Golongan IV	83	
	2. Golongan III	361	
	3. Golongan II	259	
	4. Golongan I	50	
B.	Eselon		
	1. Eselon I	0	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	33	
	4. Eselon IV	56	
	5. Eselon V	0	
	6. Fungsional Umum	23	
	7. Staf	640	
C.	Pendidikan		
	1. S3	1	
	2. S2	85	
	3. S1	208	
	4. Diploma	13	
	5. SLTA	365	
	6. SLTP	49	
	7. SD	32	

Sumber : BKD Prov DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.217

**Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Ururan Sosial**

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	34	33	33	32	33
3	Eselon IV	57	56	56	52	56
Jumlah		92	90	90	85	90

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 90/92 = 97,8%
- Diklat Kepemimpinan : 85/92 = 92,4%
- Kepangkatan : 90/92 = 97,8%

f. Alokasi dan realisasi anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 didanai dengan Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (APBD) berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial (Dinas, Suku Dinas dan Panti Sosial) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017. Dana yang tersedia secara keseluruhan untuk mendanai tugas pokok dan fungsi adalah sebesar Rp. 452.718.008.528,-

Tabel 3.218 **Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial**

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN SOSIAL	452,718,008,528	410,344,302,038	91,37
A. DINAS SOSIAL	208,168,566,505	209,117,175,017	100,46
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	244,549,442,023	201,227,127,021	82,28
2. BELANJA LANGSUNG	436,000,000	124,300,000	28,51
a. BELANJA PEGAWAI	305,047,364,078	237,921,599,167	77,99
b. BELANJA BARANG DAN JASA	3,705,028,714	2,926,972,684	79,00
- Belanja Pemeliharaan	25,723,062,969	12,436,258,884	48,35
c. BELANJA MODAL			
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	25,723,062,969	452,718,008,528	5,68

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	3,705,028,714	305,047,364,078	1,21
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	3,705,028,714	452,718,008,528	0,81
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	452,718,008,528	410,344,302,038	91,37

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

g. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Sosial tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.219 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Sosial

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman/ Billboard	5	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	Kotak Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Leaflet	1	-	-	-	-	-	-	22	23
4.	Mobil Keliling/Mobil Penyuluhan Sosial	1	1	1	1	1	1	-	-	6
5.	Media Massa (Surat Kabar, TV dan Radio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1								1
7.	E-mail	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	28
8.	Call Center	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2017

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : dinsos.jakarta.go.id
- E-mail : dinas.sosial.09@gmail.com
- Call Center : 4265116

Untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana yang berupa panti.

**Tabel 3.220 Jenis dan Jumlah Panti
Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

No	Jenis Panti	Jumlah
1	Panti Anak/Remaja (PSAA Balita, PSAA dan PSBR)	6
2.	Panti Tresna Werda (PSTW)	4
3.	Panti Narkoba (PSPP)	1
4.	Panti Rehabilitasi Cacat (PSBN, PSBD, PSBL dan PSBG)	6
5.	Panti Rehabilitasi Tuna Sosial (PSBI, PSBK dan PSBKW)	4
6.	Panti Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan (PSP)	1
7.	Loka Bina Karya	3
8.	Taman Asuhan Anak	2
9.	Rumah Perlindungan	1
10.	Sasana	12
11.	Unit Informasi Layanan Sosial	2
Jumlah		45

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2017

h. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Dinas Sosial merupakan perpaduan program *Top Down* dan program *Bottom Up* hasil Musrenbang.

Tabel 3.221 Sikronisasi Perencanaan Program Sosial

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	8	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	8	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	8	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	8		

Sumber : Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, 2017

i. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- Mobilitas PMKS jalanan yang cukup tinggi. Dengan adanya pengendalian PMKS di 48 titik rawan (ring 1 / zona 1) menyebabkan PMKS jalanan berpindah ke zona 2.
- Masih belum maksimalnya pembinaan PMKS yang telah dipulangkan ke daerah asal oleh Pemerintah Daerah setempat mengakibatkan PMKS yang sudah dikembalikan ke daerah asal kembali lagi ke Jakarta
- Anggaran kegiatan pemberdayaan fakir miskin tidak mencukupi untuk mencapai target volume sasaran yang dibebankan

2. Solusi

- Dinas Sosial melakukan patroli secara rutin penjagaan pada 48 titik rawan di zona 1 dan pengembangan penjagaan ke 228 titik rawan di zona 2 dan 3.
- Dinas Sosial akan menyusun rencana kerjasama dengan Kepolisian dalam rangka melakukan penindakan PMKS yang terjaring kembali oleh petugas penjangkauan setelah dikembalikan ke daerah asal. Dinas Sosial akan menyusun surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh PMKS agar mereka tidak lagi kembali ke jalan, jika mereka kembali lagi ke jalan maka akan ditindak secara hukum.
- Dinas Sosial akan menjajagi kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin.

j. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan-peraturan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan sosial adalah :

Tabel 3.222

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Sosial

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.	Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AIDS
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998	Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

23. Kebudayaan

a. Prioritas urusan

Terdapat 5 Program Prioritas Urusan Kebudayaan dan Tahun 2017 di DKI Jakarta. yaitu :

1. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
2. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kebudayaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.223
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kebudayaan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
2.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan nilai-nilai Budaya
3.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 2. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
4.	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Jml	4	5

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

Program urusan Kebudayaan pada tahun 2017 seluruhnya sebanyak 5 program dengan 131 kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Dan dilaksanakan sebanyak 5 program dengan kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.224
Rincian Program Urusan Kebudayaan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya	8
2	Program Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	28
3	Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan	21
4	Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan	45
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	29
6	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	18
7	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan	237
8	Pengelolaan Kendaraan Dinas	1
9	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Urusan Kebudayaan	10
10	Pengembangan data/informasi SKPD urusan Kebudayaan	3
Jumlah Total		400

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Kebudayaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pengunjung Museum mencapai 3.830.235 Orang
2. Jumlah kemitraan dengan lembaga kepariwisataan Nasional dan Internasional sebanyak 3 lembaga / Organisasi Kepariwisata Nasional / Internasional terdiri dari : Keanggotaan International Congresses And Convention Association (ICCA), Tourism Promotion Organization (TPO) dan International Association Of Golf Tour Operator (IAGTO).

3. Jumlah bangunan yang terkonservasi dan dimanfaatkan sebanyak 13 adalah Konservasi Bangunan Cagar budaya Museum Bahari, Pembuatan Tanggul Pulau Onrust, Penataan tata pameran Museum Sejarah Jakarta, Penataan dan Pemeliharaan koleksi Museum Sejarah, Pemeliharaan dan perawatan Gedung dan Kantor Museum Sejarah, Fumigasi koleksi dan cagar budaya Museum Sejarah, Perawatan Bangunan Cagar Budaya Museum Prasasti, Pemeliharaan koleksi Museum Seni, Konservasi Museum Wayang, Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Kantor Museum Seni, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan lingkungan Cagar Budaya (TSP dan TACB), Peningkatan Pencahayaan Monas, Penyempurnaan Gedung Serba Guna Perkampungan Budaya Betawi di Zona A.
4. Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan sebanyak 2.100 pelaku seni pelaku seni dan 15 jenis pelatihan terdiri dari : Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Guru Tk, Penyutradaraan Seni Teater, Seni musik Gambang Kromong Modern, Gendang, Marawis, Nasyid, Qasidah, Samrah, Seni Rupa Membetik, Tata Rias, Seni Tari Betawi Kreasi, Betawi Tradisi, Kreasi Daerah Lain, Seni Teater Tradisi.

Tabel 3.225
Realisasi Program Urusan Kebudayaan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya	8	8	100
2.	Program Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	28	28	100
3.	Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan	21	21	100

4.	Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan	45	45	100
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	29	29	100
6.	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	18	18	100
7.	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan	237	234	98,7
8.	Pengelolaan Kendaraan Dinas	1	1	100
9.	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Urusan Kebudayaan	10	10	100
10	Pengembangan data/informasi SKPD urusan Kebudayaan	3	3	100
Jumlah Total		400	397	99,25

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kebudayaan tahun 2017 dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pariwisata, dengan jumlah pegawai 346 orang dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan pariwisata.

Tabel 3.226
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kebudayaan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	346	
	1. Golongan IV	36	
	2. Golongan III	243	
	3. Golongan II	61	
	4. Golongan I	6	
B.	Eselon	346	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	13	
	4. Eselon IV	32	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	1	
	7. Pelaksana (Staf)	299	
C.	Pendidikan	346	
	1. S3	1	
	2. S2	37	
	3. S1	110	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	4. Diploma	13	
	5. SLTA	175	
	6. SLTP	7	
	7. SD	3	

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.227
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Kebudayaan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	13	13	13	13	13
3	Eselon IV	32	31	31	31	31
Jumlah		46	45	45	45	45

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 45 / 45 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 45 / 45 = 100,00 %
- Kepangkatan : 45 / 45 = 100,00 %

e. Alokasi Anggaran Urusan Kebudayaan

Alokasi dan realisasi anggaran urusan kebudayaan yaitu sebesar Rp. 279.062.056.162,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 225.969.944.576,- (80,97%)

Alokasi Anggaran Belanja langsung dialokasikan untuk 2 (dua) urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata

Tabel 3.228 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan
Kebudayaan

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEBUDAYAAN	279.062.256.162	225.969.444.556	80,97%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	179.269.979.960	179.269.979.960	100%
2. BELANJA LANGSUNG	279.062.256.162	225.969.444.556	80,97%
a. BELANJA PEGAWAI	0	0	0%
b. BELANJA	111.904.096.217	111.904.096.217	100%

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BARANG DAN JASA			
- Belanja Pemeliharaan	111.904.096.217	111.904.096.217	100%
d. BELANJA MODAL	48.378.493.616	48.378.493.616	100%
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	279.062.256.162/ 298.544.431.112	255.969.444.556/ 238.111.397.102	100%
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	48.378.493.616/ 279.062.256.162	48.378.493.616/ 279.062.256.162	100%
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	111.904.096.217/ 111.904.096.217	111.904.096.217/ 111.904.096.217	100%
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	111.904.096.217/ 279.062.256.162	111.904.096.217/ 279.062.256.162	100%

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kebudayaan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.229
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kebudayaan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UP	
1.	Papan Petunjuk	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Bahan Promosi/Informasi	3	-	-	-	-	-	-	3	-
3.	<i>Tourism Information Center</i> (TIC)	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4.	Souvenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6.	Website	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7.	E-mail	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

CATATAN :

- Website : www.jakarta-tourism.go.id

- E-mail : info@jakarta-tourism.go.id
- Call Center : 021-5205454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk pengembangan seni budaya di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 56, yaitu :

1. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Maruki (7 bangunan) :
 - Teater Besar
 - Teater Kecil
 - Graha Bhakti Budaya
 - Galeri Cipta II
 - Galeri Cipta III
 - Planetarium
 - Kampus IKJ (Terdiri 5 Gedung)
2. Gedung Kesenian Jakarta
3. Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata
4. Gedung Kesenian Miss Tjitjih
5. Monumen Nasional
6. Tugu Proklamasi
7. Perkampungan Budaya Betawi Setu babakan (1 Kawasan)
8. Pusat Kebudayaan Betawi (Eks Kodim)
9. Museum Sejarah Jakarta
10. Museum Seni Rupa dan Keramik
11. Museum Wayang
12. Museum Bahari
13. Museum Tekstil
14. Museum Djoang 45
15. Museum Prasasti
16. Museum Muhammad Husni Thamrin
17. Museum Sejarah Nasional (Monas)
18. Museum Taman Arkeologi Onrust
19. Situs Marunda
20. Rumah Si Pitung
21. Mesjid Al Alam Marunda
22. Makam TT Jongker
23. Pulau Cipir
24. Pulau Kelor
25. Pulau Bidadari
26. Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) 5 Lokasi :
 - PPSB Jakarta Utara
 - PPSB Jakarta Timur
 - PPSB Jakarta Barat
 - PPSB Jakarta Selatan
 - PPSB Jakarta Pusat
27. Anjungan DKI TMII (2 Lokasi)

- Anjungan DKI TMII
- Gedung Sangkrini Jaya Raya
- 28. Graha Wisata (2 Lokasi)
 - Graha Wisata TMII
 - Graha Wisata Ragunan
- 29. Laboratorium Karawitan Condet
- 30. Kawasan Balai Kota
- 31. Makam Pangeran Jayakarta
- 32. Makam Pangeran Wijaya Kusuma
- 33. Balai Budaya Jakarta
- 34. Kampung Tugu
- 35. Mesjid Jami Al Mansyur (Tambora)
- 36. Kawasan Kota Tua
- 37. Taman Fatahillah
- 38. Kawasan Luar Batang
- 39. Kawasan Pecinan
- 40. Kawasan Pekojan

Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi DKI Jakarta Meningkat menjadi 31 (tiga puluh satu) WBTB pada tahun 2017 :

1. Ondel Ondel
2. Topeng Betawi dan Lenong
3. Tarian Blenggo
4. Upacara Babarit
5. Bir Pletok
6. Gabus Pucung
7. Kerak Telor
8. Nasi Uduk
9. Roti Buaya
10. Sayur Besan
11. Tanjidor
12. Palang Pintu
13. Sahibul Hikayat
14. Gambang Kromomg
15. Silat Beksi
16. Busana Pengantin
17. Gambang Rancag
18. Topeng Jantuk
19. Keroncong Tugu
20. Samrah
21. Topeng Blantek
22. Gado-gado Betawi
23. Soto Betawi
24. Kebaya Kerancang
25. Batik Betawi

26. Topeng Tunggal
27. Penganten Sunat
28. Rebana Biang
29. Rebana Hadroh
30. Dodol Betawi
31. Silat Cingkrik

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Kebudayaan mencakup seluruh elemen masyarakat khususnya pekerja dan penikmat seni budaya. Oleh karena itu dalam proses perencanaan mengakomodir kepentingan *stakeholder* bidang kebudayaan melalui berbagai forum. Usulan *bottom up* diintegrasikan dengan *top down* menjadi Renja SKPD.

Tabel 3.230
Sinkronisasi Perencanaan Program Kepudayaan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	80
2	RENJA SKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	5	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	5	5	100

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan urusan kebudayaan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih rendahnya melibatkan masyarakat pada pengembangan seni budaya. Masyarakat belum secara sukarela berperan aktif mengembangkan seni budaya	Untuk meningkatkan melibatkan masyarakat pada pengembangan seni budaya telah dilakukan berbagai upaya antara lain : melibatkan pelaku seni dan komunitas seni (masyarakat) dalam menelenggarakan event-event seni budaya (Betawi dan Nasional), pemberdayaan sanggar- sanggar, pemberian penghargaan terhadap pelaku seni, mengadakan berbagai lomba seni budaya baik yang

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		berjenjang maupun provinsi
2.	Seni budaya belum menjadi harapan hidup bagi pelaku seni dan komunitas seni	Untuk menjadikan seni budaya sebagai harapan hidup/sarana mencari nafkah bagi pelaku seni dan komunitas seni, telah dilakukan upaya pemberdayaan pelaku seni dan komunitas seni (sanggar-sanggar) melalui mengikutsertakan salan pelbagai bantuan event-event yang diselenggarakan, dan memberikan stimulus bantuan peralatan kesenian, mengikutsertakan dalam pelatihan seni budaya kearah yang lebih profesional.
3.	Perkembangan ilmu teknologi informasi yang begitu pesat mengakibatkan kecenderungan tergesernya budaya daerah oleh budaya asing.	Untuk menghindari dampak negatif perkembangan ilmu dan Teknologi (IPTEK) dan arus informasi global yang mengakibatkan kecenderunagn tergesernya budaya daerah oleh budaya asing telah dilakukan upaya pelatihan berbagai jenis seni yang menyertakan guru-guru Tk,SD, SLTP dan SLTA. Melakukan wajib kunjung bagi pelajar di museum ke Destinasi pariwisata sambil memberikan pemahaman betapa kayanya seni budaya yang kita miliki sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
4.	Banyak jenis dan unsur budaya tidak terjaga keasliannya dan belum terintegrasi secara baik sebagai pengakuan hak kekayaan intelektual.	Untuk melindungi dan menjaga jenis dan unsur agar terjaga keasliannya dan teregistrasi secara baik sebagai pengakuan hak kekayaan intelektual, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan eksperimentasi seni budaya yang hampir punah, melakukan kegiatan Nominasi Warisan Budaya Tak Benda dan mengusulkan ke Lembaga terkait pengakuan sebagai hak milik kekayaan inteletual.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Masih kurang memadainya sarana prasarana kebudayaan yang modern dan sesuai dengan tuntutan jaman.	Untuk meningkatkan sarana prasarana yang sesuai dengan tuntutan jaman telah dilakukan pembangunan dan pengembangan gedung-gedung pertunjukan kesenian dengan fasilitas modern sesuai standar Internasional, berkapasitas besar, lengkap dan nyaman. Salah satu kegiatannya adalah penatan/revitalisasi museum, rehab gedung-gedung kesenian, pengembangan sarana dan prasarana di PKJ TIM. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan.

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.231
**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Kebudayaan**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pelestarian Kebudayaan Betawi Pergub 229 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian budaya Betawi Pergub Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi Pergub Nomor 192 Tahun 2016 tentang Pembubaran Unit Pengelola Museum Prasasti Pergub Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota tua

Sumber : Dinas Parbud Prov DKI Jakarta, 2017

24. Statistik

a. Prioritas urusan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Sub Urusan Statistik Sektorial penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga terdapat perbedaan urusan statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu statistik dasar. Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama beroperasinya Pusat Pelayanan Statistik sehingga anggaran kegiatan dianggarkan pada APBD Perubahan 2017 berupa pelaksanaan kegiatan Survei Potensi Pengembangan Perekonomian di Rumah Susun DKI Jakarta untuk mendapatkan data/informasi yang lebih detail mengenai permasalahan kondisi perekonomian warga penghuni Rusunawa yang selanjutnya dilakukan analisis sehingga menjadi bahan rekomendasi pembuatan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kondisi perekonomian warga penghuni Rusunawa DKI Jakarta.

b. Program dan kegiatan

Program Urusan Statistik melekat pada Program pengembangan Statistik Daerah dari Bappeda dengan kegiatan Penyelenggaraan Hackjak 2017.

Tabel 3.232
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Statistik

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
1		Program statistik daerah
Jml	0	1

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.233
Rincian Program Urusan Statistik

No	Nama Program dan Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1.	Program Statistik Daerah	
	Survei Potensi Pengembangan Perekonomian di Rumah Susun DKI Jakarta	1
	Jumlah	1

Sumber : Diskominfo Prov DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Seluruh rencana kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 dapat dilaksanakan.

Tabel 3.234
Realisasi Program Urusan Statistik

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program statistik daerah	1	1	100
	Jumlah Total	1	1	100

Sumber : Diskominfo Prov DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Statistik Tahun 2017 dilaksanakan oleh UPT Pusat Pelayanan Statistik pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun jumlah dan kualifikasi pegawai sebagaimana berikut.

Tabel 3.235 Rekapitulasi Pegawai Urusan Statistik

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	6	
	• Golongan IV	1	
	• Golongan III	5	
	• Golongan II	0	
	• Golongan I	0	
B.	Eselon	6	
	• Eselon II	0	
	• Eselon III	1	
	• Eselon IV	1	
	• Staf	4	
C.	Pendidikan	6	
	• S2	0	

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• S1	5	
	• Diploma	0	
	• SLTA	1	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : Diskominfo Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.236 Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Statistik

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	1	1	1	1	1
3	Eselon IV	1	1	1	0	1
Jumlah		2	2	2	1	2

Sumber : Diskominfo Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : $2 / 2 = 100,00 \%$
- Diklat Kepemimpinan : $1 / 2 = 50,00 \%$
- Kepangkatan : $2 / 2 = 100,00 \%$

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Statistik melekat pada Anggaran Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Adapun anggaran yang dialokasikan sebagai berikut.

Tabel 3.237 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN STATISTIK			
1. BELANJA LANGSUNG	246.339.930	220.454.050	89,49
a. Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber	214.700.000	193.400.000	90,08
b. Belanja Cetak Umum	5.117.805	3.594.800	70,24
c. Belanja/Uang Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000	5.235.000	70,74
d. Belanja Alat Tulis Kantor	19.122.125	18.224.250	95,30

Sumber : Diskominfo Prov DKI Jakarta, 2017

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Terdapat beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasional pekerjaan dan media informasi Pusat Pelayanan Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.238 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Statistik

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Website	1	statistik.jakarta.go.id
2.	E-mail	2	statistikdki@jakarta.go.id , statistikdki@gmail.com

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2017

Pusat Pelayanan Statistik juga menggunakan sarana/media lain yang dimiliki/dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik seperti portal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jakarta.go.id maupun portal satu data DKI Jakarta data.jakarta.go.id.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pada Urusan Statistik merupakan kebijakan *top down*, karena urusan ini berupa pelayanan informasi kepada instansi pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder pemerintahan yang memerlukannya.

Tabel 3.239 Sikronisasi Perencanaan Program Statistik

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	1	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	1		

Sumber : Diskominfotik Prov DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

Masalah yang ditemui pada kegiatan Survei Potensi Pengembangan Perekonomian di Rumah Susun DKI Jakarta adalah sempitnya waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan

survei yang hanya sekitar 2 bulan saja karena menggunakan anggaran APBDP 2017 sehingga ada beberapa rencana kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu FGD paska pelaksanaan survei dan pencetakan buku hasil pelaksanaan survey.

Pelaksanaan kegiatan survei memerlukan waktu panjang untuk survei lapangan sampai dengan analisis data serta melibatkan banyak sumber daya manusia sehingga sebaiknya tidak dilaksanakan di akhir tahun anggaran dan diperlukannya tenaga non PNS untuk membantu pelaksanaan koordinasi dan administrasi kegiatan serta mengupayakan solusi berupa penyediaan tenaga surveyor melalui lembaga survei.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperlukan integrasi data sektoral yang dimiliki oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan output yang didapatkan merupakan output statistik yang berkualitas dan terpercaya.

25. Kearsipan

a. Prioritas urusan

- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

b. Program dan kegiatan

- Urusan Kearsipan.

Tabel 3.240
**Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kearsipan**

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
1	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
JML	1	2

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 2 Program Urusan Kearsipan dengan 8 Kegiatan.

Tabel 3.241
Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	4
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan	4
	Total	8

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Dari kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 diperoleh hasil antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.242
Realisasi Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1	1	100
2.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	2	2	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan	1	1	100
Jumlah		8	8	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

Dari 42 SKPD di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya sudah mendapatkan sosialisasi dan berbagai bimbingan teknis sehingga diharapkan sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Untuk SDM pengelola kearsipan telah dilakukan peningkatan pengembangan wawasan dan peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan asistensi Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta **42 SKPD/UKPD** dan 12 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

d. SDM Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan jumlah pegawai sebanyak 229 pegawai, dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan perpustakaan

Tabel 3.243
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kearsipan

No	Kualifikasi	BPAD
A.	Golongan	229
	1. Gol. IV	24
	2. Gol III	125
	3. Gol II	73
	4. Gol I	7
B.	Eselon	229
	1. Eselon I	-
	2. Eselon II	1
	3. Eselon III	11
	4. Eselon IV	33
	5. Eselon V	-
	6. Fungsional	37
	7. Pelaksana (Staf)	147
C.	Pendidikan	229

No	Kualifikasi	BPAD
1.	S3	3
2.	S2	23
3.	S1	79
4.	Diploma	10
5.	SLTA	100
6.	SLTP	10
7.	SD	6

Sumber : BKD Prov.DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.244
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Kearsipan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1		1
2	Eselon III	11	11	11		11
3	Eselon IV	33	33	33		33
	Jumlah	45	45	45		45

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 50 / 50 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 50 / 50 = 100 %
- Kepangkatan : 51 / 51 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Anggaran program kearsipan Tahun 2017 mengikut anggaran urusan perpustakaan.

Tabel 3.245 **Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan**

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEARSIPAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.743.719.788	29.381.761.599	
2. BELANJA LANGSUNG	8.437.964.302	6.451.074.766	
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	935.982.300	797.098.225	85,16

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
- Belanja Pemeliharaan	37.912.050	22.191.675	58,53
c. BELANJA MODAL	34.927.659.593	26.871.130.000	76,93
CATATAN PERBANDINGAN :			
- Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
- Belanja Modal : Belanja URUSAN			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
- Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kearsipan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.246
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kearsipan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Papan Pengumuman	7	
2.	Kotak Pengaduan	7	
3.	Media Masa	1	Online
4.	Website	1	http://dispusip.jakarta.go.id
5.	E-mail	1	

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : <http://dispusip.jakarta.go.id>
- E-mail :

Untuk mendukung kegiatan operasional, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasana sebagaimana terlihat pada Tabel 3.206

Tabel 3.247 Sarana dan Prasarana Kearsipan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (SIMARS)	Ruang
2.	Ruang Pengelolaan Arsif Inaktif dan Statis	Ruang
3.	Ruang Pengelolaan Arsip Media Baru (microfilm, video, foto, kaset suara)	Ruang
4.	Ruang Perawatan Arsip/Dokumen	Ruang
5.	Ruang Arsip Otomatis elektronik	Ruang
6.	Ruang Fumigasi Arsip	Ruang
7.	Ruang tahan api	Ruang
8.	Lemari Kardex	Unit
9.	Lemari Roll Opack	Unit
10.	Lemari Kartografi	Unit
11.	Rak Arsip	Unit

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Kearsipan dilakukan atas dasar pertimbangan amanat UU 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan PP 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kebijakan kearsipan, Pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan kearsipan dengan memperhatikan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kearsipan.

Tabel 3.248
Sikronisasi Perencanaan Program Kearsipan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	2	RENJA : SKPD RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	2	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	2	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	2		

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Penyelesaian pembangunan Depo Arsip Sudin Jaksel pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang

Solusi

Dianggarkan kembali pada APBD tahun 2018 dengan penyesuaian anggaran

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kearsipan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.249
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kearsipan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub. Nomor 145 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.
2.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pergub Nomor 282 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pergub. Nomor 300 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4.	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Pergub. Nomor 122 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum
5.		Pergub. Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Arsiparis dan Pustakawan
6.		Pergub Nomor 238 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
7.		Pergub Nomor 213 tahun 2016 tentang Standardisasi Kebutuhan RPTRA
8.		Pergub Nomor 180 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus
9.		Pergub Nomor 2 tahun 2016

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		tentang Perpustakaan Digital iJakarta

Prestasi nasional dan internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Juara II Lomba Lembaga Kearsipan Daerah Tingkat Nasional Tahun 2017
2. Juara Harapan II Lomba Arsiparis Tingkat Nasional Tahun 2017

26. Perpustakaan

a. Prioritas urusan

- Program Pengembangan Budaya Baca
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan
- Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perpustakaan
- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Perpustakaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 3.250
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perpustakaan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pengembangan	Pengelolaan Kendaraan Dinas

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
	Perpustakaan	Urusan Perpustakaan
2	Program Nilai Budaya	Pengembangan Budaya Baca
3		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan
4		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Perpustakaan
5		Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
6		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Jml	1	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 6 Program Urusan Perpustakaan dengan 303 kegiatan.

Tabel 3.251 Program Urusan Perpustakaan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perpustakaan	7
2.	Pengembangan Budaya Baca	54
3.	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan	176
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Perpustakaan	2
5.	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	7
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	57
Jumlah		303

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tahun 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.252 Realisasi Program Urusan Perpustakaan

No	Program	Jumlah, Kegiatan	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Perpustakaan	7	7	74
2.	Pengembangan Budaya Baca	54	54	100 %
3.	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan	176	176	100 %
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan	2	2	100 %

	Perpustakaan			
5.	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	7	7	100 %
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	57	57	100 %
	Jumlah	303	303	100 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik pada tahun 2017 sebanyak 1.893.392 pengunjung, yang terdiri dari 1.649.842 orang pengunjung konvensional dan 23.711 pengunjung (downloader) perpustakaan elektronik iJakarta.

Dispusip Provinsi memiliki 63 unit armada perpustakaan keliling, yang terdiri dari 2 unit mobil perpustakaan kontainer (Permata), 35 unit mobil perpustakaan keliling, dan 16 motor perpustakaan keliling dan 10 perpustakaan gerobak motor

d. Sumber Daya Manusia urusan Perpustakaan

Program dan Kegiatan Perpustakaan diselenggarakan dengan sumber Daya Manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ditingkat Provinsi Provinsi (Dispusip Provinsi DKI Jakarta) dan Tingkat Kantor Kota di 5 (enam) wilayah Kota Administrasi, dengan jumlah pegawai sebanyak 229 pegawai, dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan kearsipan.

Tabel 3.253
Rekapitulasi Pegawai Urusan Perpustakaan

No	Kualifikasi	BPAD
A.	Golongan	229
	1. Gol. IV	24
	2. Gol III	125
	3. Gol II	73
	4. Gol I	7
B.	Eselon	229
	1. Eselon I	-

No	Kualifikasi	BPAD
	2.Eselon II	1
	3.Eselon III	11
	4.Eselon IV	33
	5. Eselon V	-
	6.Fungsional	37
	7.Pelaksana (Staf)	147
C.	Pendidikan	229
	1. S3	3
	2. S2	23
	3. S1	79
	4. Diploma	10
	5. SLTA	100
	6. SLTP	10
	7. SD	6

Sumber: BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.254
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Perpustakaan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1		1
2	Eselon III	11	11	11		11
3	Eselon IV	33	33	33		33
	Jumlah	45	45	45		45

Sumber : Kepegawaian BPAD , 2017

Berikut Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan :

- Tingkat Pendidikan : 50 / 50 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 50 / 50 = 100 %
- Kepangkatan : 50 / 50 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perpustakaan tahun anggaran 2017 merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari anggaran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah,

Tabel 3.255
Alokasi dan Realisasi Urusan Perpustakaan pada BPAD Provinsi DKI Jakarta

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERPUSTAKAAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.883.289.152	42.966.877.178	
2. BELANJA LANGSUNG	27.231.216.034	22.347.649.001	
a. BELANJA PEGAWAI	31.414.920.619	23.654.079.048	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	3.468.938.592	2.320.988.341	
- Biaya Pemeliharaan	39.666.367.615	11.514.252.653	
c. BELANJA MODAL	47.883.289.152	42.966.877.178	
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
• Belanja Modal : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perpustakaan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.256
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/Prasarana	Jumlah Fasilitas pada BPAD / KPAK								Jml
		Prov	JP	JU	JB	JS	JT	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	-	7
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	-	7
3.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	-	7

Website : www.bpad.jakarta.go.id

E-mail : bpad@bpadjakarta.net

Dalam penyelenggaraan Tugas, Pokok dan Fungsinya Perpustakaan memberikan sarana dan prasarana yang tersebar di Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten berupa :

Tabel 3.257
Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Nama Sarana dan Prasarana		Jumlah
1.	Gedung Perpustakaan Tingkat Provinsi	1 buah
2.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Pusat	1 buah
3.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Utara	1 buah
4.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Barat	1 buah
5.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Selatan	1 buah
6.	Gedung Perpustakaan Tingkat Kota Jakarta Timur	1 buah
7.	Layanan Unit Mobil Perpustakaan Keliling	35 unit
8.	Koleksi Buku	1.127.565 eks.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

Setiap gedung perpustakaan umumnya memiliki fasilitas seperti :

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tata Ruang: (1) Ruang Kantor, (2) Ruang Layanan Dewasa, (3) Ruang Layanan Anak – Anak, (4) Ruang Audio Visual, (5) Ruang Layanan Khusus Betawi dan (6) Ruang Audoturium Minat Baca/Ruang rapat, (7) Ruang pengolahan koleksi, (8) Ruang Data Center, (9) Ruang Pameran, (10) Ruang Diskusi, (11) Ruang Bermain Anak.
- Kantor Perpustakaan Umum Sudin Kota dengan Tata Ruang: (1) Ruang Kantor, (2) Ruang Layanan Dewasa, (3) Ruang Layanan Anak – Anak, (4) Ruang Audio Visual, (5) Ruang Layanan Khusus Betawi, (6) Ruang Bermain Anak, (7) Ruang Pengolahan Koleksi. (8). Ruang server.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan urusan perpustakaan terselenggara dengan memperhatikan amanat RPJMD melalui tahapan harmonisasi dan sinkronisasi serta integrasi program dan anggaran baik secara vertikal maupun horizontal melalui pendekatan Top

Down dan Bottom Up baik pada tingkat Provinsi maupun Kota.

Tabel 3.258
Sikronisasi Perencanaan Program Perpustakaan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	6	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	6	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	6		

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

Penyelesaian pembangunan Perpustakaan Cikini belum dapat terlaksana pada tahun 2017

2) Solusi

Dianggarkan pada tahun 2018

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri atau peraturan yang berkaitan dengan urusan Perpustakaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.259
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Perpustakaan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub. Nomor 145 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.
2	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pergub Nomor 282 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pergub. Nomor 300 tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
4.	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Pergub. Nomor 122 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum
5.		Pergub. Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Arsiparis dan Pustakawan
6.		Pergub Nomor 238 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
7.		Pergub Nomor 213 tahun 2016 tentang Standardisasi Kebutuhan RPTRA
8.		Pergub Nomor 180 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus
9.		Pergub Nomor 2 tahun 2016 tentang Perpustakaan Digital iJakarta

C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Prioritas Urusan :

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kelautan dan Perikanan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.260
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program	
	Nasional	Provinsi
1	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
2	Program Pengembangan dan Pengelolaa Sumber	Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya

No.	Program	
	Nasional	Provinsi
	Daya Kelautan	kelautan yang berkelanjutan
Jml	2	2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Program dalam Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Pertanian tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.261 **Program dan Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan**

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	20
2	Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan	1
3	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	16
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan	52
5	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kelautan dan Perikanan	1
Total		90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017 dalam Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :

Tabel 3.262
**Realisasi Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Pertanian**

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	20	20	100
2	Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan	1	1	100
3	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	16	16	100
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan	52	52	100

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
5	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kelautan dan Perikanan	1	1	100
Total		90	90	90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Capaian lain dalam urusan Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut.

- 1) Konsumsi ikan penduduk DKI Jakarta perkapita selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.263
Konsumsi Ikan di Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	Realisasi (Kg)
1.	2007	23,24
2.	2008	23,52
3.	2009	23,77
4.	2010	24,28
5.	2011	24,79
6.	2012	24,92
7.	2013	31,31
8.	2014	31,46
9.	2015	31,46
10.	2016	33,03
11.	2017	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Konsumsi ikan perkapita/tahun cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan melalui kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan, Gelar Hasil Perikanan, Lomba Masak Ikan dan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan.

- Produksi perikanan DKI Jakarta dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Volume dan nilai produksi perikanan DKI Jakarta tahun 2010 - 2017 terlihat pada Tabel 3.225

Tabel 3.264
Volume dan Nilai Produksi Perikanan di DKI Jakarta

No.	Komoditi	Tahun				
		2013	2014	2015 ^{a)}	2016 ^{a)}	2017
1.	Perikanan Tangkap					
	- Volume (ton)	205.319,90	224.244,80	213.614,83	141.778	
	- Nilai (Rp. 1000)	3.212.457.265	4.263.078.484,50			
2.	Perikanan Budidaya					
	- Volume (ton)	5.069,23	6.970,63	7.153,19	4.836.361	
	- Nilai (Rp. 1000)	97.321.842	175.968.817			
	Total					
	- Volume (ton)	210.389,13	231.215,43	220.768,02	4.978.139	
	- Nilai (Rp. 1000)	3.309.779.108	4.439.047.301,5			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Kegiatan usaha perikanan budidaya yang terus dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya laut. Luas lahan perikanan di Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2017 umumnya didominasi oleh budidaya tambak. Produksi perikanan budidaya laut sedang digalakkan di BBIL (Balai Benih Induk Laut) di Pulau Tidung. terkait dengan peningkatan produksi, peningkatan produksi budidaya diarahkan pada budidaya laut di wilayah Kepulauan Seribu.

Ekspor ikan konsumsi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.265
Ekspor Hasil Perikanan dari Provinsi DKI Jakarta

Ekspor Ikan Konsumsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
- Volume (kg)	57.391.032,97	58.000.189,83	93.107.768,01	85.451.000	
- Nilai (US \$)	425.934.009,15	431.608.850,90	675.619.148,33	1.060.000.000	

- Jumlah SME	11.650	10.639	10.991		
- Perusahaan yang Dilayani	79	71			

SME = Sertifikat Mutu Ekspor

Pada tahun 2017 volume ekspor ikan konsumsi Provinsi DKI Jakarta menurun tetapi nilai ekspor meningkat. Negara tujuan ekspor adalah Jepang, USA, Vietnam, Iran, Thailand dan Singapura dan lain-lain.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, dengan jumlah pegawai 150 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT).

Tabel 3.266
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	Jut	JT	JSI	JBr	Kep. 1000	UPT	
A.	Golongan	45	9	15	9	10	11	8	43	150
	• Golongan IV	8	1	2	2	4	2	1	6	26
	• Golongan III	34	8	12	6	5	8	7	26	106
	• Golongan II	3	-	1	1	1	1		10	17
	• Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	1	1
B.	Eselon	45	9	15	9	10	11	8	43	150
	• Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Eselon III	2	-	1	-	-	-	1	2	6
	• Eselon IV	7	3	3	3	3	3	1	2	25
	• Fungsional	1	1	1	-	-	-	-	2	5
	• Staf	34	5	10	6	7	8	6	37	113
C.	Pendidikan	45	9	15	9	10	11	8	43	150
	• S3	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	• S2	20	2	1	2	3	1	1	6	36
	• S1	17	4	6	5	3	4	2	11	52
	• Diploma	1	-	-	-	-	1	-	3	5
	• SLTA	6	3	8	2	4	5	5	22	55

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	Jut	JT	JSI	JBr	Kep. 1000	UPT	
	• SLTP	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	• SD	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.267
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Kelautan dan Perikanan

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas					
	• Eselon II	1	1	1	1	1
	• Eselon III	2	2	2	2	2
	• Eselon IV	7	7	7	7	7
2	Sudin Jakpus					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
3	Sudin Jakut					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
4	Sudin Jaktim					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
5	Sudin Jaksel					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
6	Sudin Jakbar					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	3	3	3	3	3
7	Sudin Kep Seribu					
	• Eselon III	1	1	1	1	1

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
8	UPT					
	• Eselon III	2	2	2	2	2
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
	JUMLAH					
	• Eselon II	1	1	1	1	1
	• Eselon III	6	6	6	6	6
	• Eselon IV	25	25	25	25	25
	TOTAL	32	32	32	32	32

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 32 / 32 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 32 / 32 = 100,00 %
- Kepangkatan : 32 / 32 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Adapun alokasi anggaran urusan Kelautan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.268
Alokasi Program Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Pertanian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	499.602.826.078	364.627.490.435	72,98
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	135.532.740.178	106.795.874.962	78,80
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	0
b. BELANJA BARANG DAN JASA	58.637.989.467	47.993.006.175	81,85
- Belanja Pemeliharaan	11.370.876.746	8.760.080.114	77,04
c. BELANJA MODAL	76.894.750.711	58.802.868.787	76,47
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	499.602.826.078	57.365.040.315.366	0,87
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	58.802.868.787	364.627.490.435	16,13
• Belanja Pemeliharaan : Belanja	8.760.080.114		18,25

Barang & Jasa		47.993.006.175	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	8.760.080.114	364.627.490.435	2,40

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.269
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	2	9
2.	Kota Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	2	9
3.	Website	1								1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	2	9
5.	Call Center	1	1	1	1	1	1	1	2	9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Provinsi

- Website : dkpjakarta.web.id
- E-mail : dkp.jakarta@yahoo.com
- Call Center : 021 6286743, 021 6267276, 021 6014728

Jakarta Pusat

- E-mail : tan_hut_jp@yahoo.com
- Call Center : 021 3851854

Jakarta Utara

- E-mail : sdterikanju@gmail.com
- Call Center : 021 4308876

Jakarta Timur

- E-mail : ternakikanjaktim@yahoo.com
- Call Center : 021 4808337

Jakarta Selatan

- Call Center : 021 72792545

Jakarta Barat

- E-mail : nakkanjb@gmail.com
- Call Center : 021 58356243

Kepulauan Seribu

- E-mail : ikanseribu@yahoo.com
- Call Center : 021 58356239

UPT

- E-mail : pkpp_ppi@yahoo.co.id
- Call Center : 021 6610745
- E-mail : labmutu_dki@yahoo.co.id
- Call Center : 021 6684224
- E-mail : pusdakan@yahoo.co.id
- Call Center : 021 7864180

Pemerintah Provinsi DKI memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi Urusan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.270
Sarana dan Prasarana Urusan Kelautan dan Pertanian

Urian Sarana dan Prasarana		Jumlah
1.	Balai Pengujian Mutu &Pengolahan Hasil Perikanan	1
2.	Pusat Budidaya Perikanan - Balai Benih Ikan Ciganjur - Balai Benih Ikan Ujung Menteng - Balai Benih Ikan Kalideres - Balai Benih Ikan Ciracas - Balai Benih Ikan Laut Pulau Tidung - Pusat Promosi Hasil Perikanan Sumenep - Pusat Promosi Hasil Perikanan Cngkareng	7 sub unit
3.	Balai Teknologi Penangkapan Ikan, yang mempunyai beberapa perangkat pendukung antara lain : - Gedung bengkel dan Training - Gedung Pelayanan Perbaikan kapal - Gedung Workshop - Gedung Basuic Safety Training - Simulator Navigasi Kapal dan Alat tangkap Ikan - Galangan kapl (docking) - Kapal latih perikanan - Tempat perbaikan alat tangkap ikan/jaring - Gudang tempat peralatan bengkel perkapalan - Kios tempat alat-alat perikanan dan perbekalan nelayan - Dermaga bongkal muat kapal perikanan - Wisma penginapan	1
4.	Unit Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan	1
5.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - TPI Muara Baru - TPI Muara Angke - TPI Kamal Muara - TPI Kalibaru - TPI Cilincing - TPI Pulau Pramuka	6

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan perencanaan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Perencanaan merupakan gabungan dari *Top down* dan *bottom up planning* melalui proses Musrenbang.

Tabel 3.271
Sikronisasi Perencanaan Program Kelautan dan Perikanan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	2	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	2	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	2	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	2		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

- Dalam mengelola sumberdaya kelautan masih terkendala belum adanya legalitas perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 27 Tahun 2007. Untuk itu selain dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga dilakukan perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem laut pesisir dan optimalisasi pengembangan lembaga pengawas sumberdaya, serta memperkuat kapasitas pendukung.
- Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan masih terhambat oleh sarana dan prasarana pelabuhan ikan melebihi daya tampung, kurangnya pasokan benih ikan dan rendahnya teknologi budidaya. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan sarana pelabuhan, pemberdayaan nelayan, pengembangan pusat pemasaran ikan hias dan pembangunan sarana promosi.
- Belum optimalnya penataan kawasan pangkalan pendaratan ikan Muara Angke sehingga perlu penataan kawasan Pelabuhan Muara Angke.
- Perairan Teluk Jakarta sangat dipengaruhi oleh 13 sungai yang bermuara di pesisir teluk Jakarta yang disinyalir telah

mengakibatkan pencemaran terutama bersumber dari limbah domestik. Dalam upaya mengurangi bahkan menghilangkan pencemaran lingkungan perairan Teluk Jakarta, perlu upaya koordinasi yang menyeluruh antar dinas/instansi terkait yang dikoordinator di Tingkat Provinsi.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kelautan dan Perikanan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.272
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2004	Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan
		Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Summber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Keberhasilan pembangunan kelautan dan pertanian khususnya dibidang perikanan dan kelautan dapat terwujud bila segala potensi sumberdaya dan peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lestari dan bertanggung jawab.

2. Pertanian

a. Prioritas urusan

Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Pertanian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %

Tabel 3.273
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Pertanian

No.	Program	
	Nasional	Provinsi
1	Program Pengembangan Agribisnis	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura
Jml	2	2

Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Tahun 2017 terdapat 6 Program yang terdikuti dalam 88 kegiatan dalam Urusan Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.274
Program Urusan Pertanian

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	4
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan	3
3	Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis	20

4	Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	22
Total		49

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil kegiatan selama Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.275
Realisasi Program Urusan Pertanian

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	4	100
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan	3	3	100
3	Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis	20	20	100
4	Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	22	22	100
Total		49	49	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pertanian Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, dengan jumlah pegawai 281 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT).

Tabel 3.276
Rekapitulasi Pegawai Urusan Pertanian

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
A.	Golongan	70	23	24	37	34	26	5	62	281
	• Golongan IV	11	3	1	3	5	3	1	2	29
	• Golongan III	43	18	22	32	28	21	3	43	210

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
	• Golongan II	15	1	1	2	1	2	1	17	40
	• Golongan I	1	1							2
B.	Eselon	70	23	24	37	34	26	5	62	281
	• Eselon II									0
	• Eselon III	3	1		1	1	1		1	8
	• Eselon IV	7	4	4	5	5	4	1	1	31
	• Fungsional	12	10	10	13	14	10	2	11	82
	• Staf	48	8	10	18	14	11	2	49	160
C.	Pendidikan	70	23	24	37	34	26	5	62	281
	• S3								1	1
	• S2	21	2	1	4	5	3	1	15	52
	• S1	22	11	7	13	8	12	1	6	80
	• Diploma	7	2	6	12	8	1	1	30	67
	• SLTA	15	8	9	8	12	10	1	6	69
	• SLTP	4				1		1	4	10
	• SD	1		1						2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.277
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pertanian

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas					
	• Eselon II					
	• Eselon III	3	3	3	3	3
	• Eselon IV	7	7	7	7	7
2	Sudin Jakpus					

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	4	4	4	4	4
3	Sudin Jakut					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	4	4	4	4	4
4	Sudin Jaktim					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	5	5	5	5	5
5	Sudin Jaksel					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	5	5	5	5	5
6	Sudin Jakbar					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	4	4	4	4	4
7	Sudin Kep Seribu					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
8	UPT					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
	JUMLAH					
	• Eselon II	0	0	0	0	0
	• Eselon III	8	8	8	8	8
	• Eselon IV	31	31	31	31	31
	TOTAL	39	39	39	32	39

Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 39 / 39 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 39 / 39 = 100,00 %
- Kepangkatan : 39 / 39 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pertanian merupakan bagian dari alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Pertanian dan SKPD/UKPD lainnya, yaitu :

Tabel 3.278 **Alokasi Program Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Kelautan dan Pertanian**

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERTANIAN	49.880.349.896	38.697.200.288	77,58
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	49.880.349.896	38.697.200.288	77,58
a. BELANJA PEGAWAI	73.073.200	73.073.200	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	42.807.625.878	33.231.953.801	77,63
- Belanja Pemeliharaan	3.830.887.465	2.968.955.966	77,50
c. BELANJA MODAL	6.999.650.818	5.392.173.287	77,03
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	49.880.349.896	57.365.040.315.366	0,09
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	5.392.173.287	38.697.200.288	13,93
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.968.955.966	33.231.953.801	8,93
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	2.968.955.966	38.697.200.288	7,67

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pertanian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.279
Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Pertanian

Urian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Kebun bibit pertanian	16 lokasi
2. Pasar Bunga Rawa Belong	1 lokasi
3. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Sapi/ Kerbau	2
4. RPH kambing/Domba	3
5. RPH Babi	1
6. Balai Kesehatan Hewan dan ikan	1
7. Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil	1

Peternakan	
8. Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan	1
9. Balai Proteksi tanaman	1
10. Pusat Pelatihan (Training Centre/TC) Pertanian Klender Jakarta Timur	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.280
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pertanian

No	Jenis Fasilitas/Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	2	9
2.	Kota Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	0	7
3.	Website	1								1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	2	9
5.	Call Center	1	1	1	1	1	1	1	2	9

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

Provinsi :

- Website : dcpjakarta.web.id
- E-mail : dcp.jakarta@yahoo.com
- Call Center : 021 6007251 , 021 6286625, 021 6285278, 021 6285484

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Pertanian merupakan gabungan *bottom up* dan *top down planning*. yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Kota/Kabupaten Administrasi dan badan Perencanaan Daerah.

Tabel 3.281
Sinkronisasi Perencanaan Program Pertanian

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100,00
3	RKA 2017	4	RKA : DPA	100,00
4	DPA 2017	4		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

- Semakin menurunnya luas lahan sawah di DKI Jakarta sebagai akibat dari alih fungsi lahan, sehingga keberadaan sawah di DKI Jakarta perlu dipertahankan dan dijadikan sawah abadi sebagai salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral, baik untuk mempertahankan keberadaan sawah maupun untuk intensifikasi penanaman produk pertanian dalam ruang yang sempit tetapi memiliki produktivitas yang tinggi.
- Ketergantungan kebutuhan komoditas pertanian dari luar Provinsi DKI Jakarta sangat besar, belum adanya standarisasi mutu komoditas pertanian, termasuk perlu adanya ketentuan dan peraturan mengenai pengawasan peredaran produk pertanian, masih lemahnya perlindungan konsumen terhadap bahaya pestisida dan zat-zat berbahaya lainnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama dengan daerah produsen.

i. Hal-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pertanian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.282
**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pertanian**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil Pertanian	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Pertanian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil Pertanian	Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan keamanan Komoditas Hasil pertanian
3	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan peredaran Unggas
4	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas
5.	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan peredaran unggas
6.	Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman.	Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 1909/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1627/2009 tentang Lokasi Penampungan dan Penampungan Unggas

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

- Panen dan produksi padi, jagung, kacang tanah dan ubi kayu dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.283
Panen dan Produksi Padi, Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Kayu di DKI Jakarta

No.	Komoditi	Tahun						
		2010	2011	2012	2013*)	2014	2015	2016*)

No.	Komoditi	Tahun						
		2010	2011	2012	2013*)	2014	2015	2016*)
1.	Padi - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	2.015 11.164 55,40	1.723 9.516 55,23	1.839 10.208 55,50	1.744 10.268 58,88	1.360 7.445 54,74	1.137 6.361 55,95	1.385 7.858 56,73
2.	Jagung - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	15 31 20,67	12 23 19,17	10 19 19,00	8 15 19,00			
3.	Kacang Tanah - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	9 10 11,11	7 7 10,00	6 6 10,00	5 5 10,00			
4.	Ubi Kayu - Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Kwt/Ha)	25 290 116,00	15 176 117,33	14 164 117,00	13 152 117,00			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

- Kasus yang ditangani pada tahun 2017 hanyalah 7 kasus Avian Influenza saja dan 1 kasus Brucellosis.

Pencapaian RPJMD urusan pertanian tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KINERJA 2014	KINERJA 2015	KINERJA 2017
1	Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan	60 Kali	61 kali	10 kali
2	Peningkatan Volume Pemasaran :			
	1. Daun Pelengkap (Ikat)	809.809	893,856	900.276
	2. Bunga Potong (Ikat)	1.208.559	1,136,077	971.037
	3. Bunga Rampai (Bungkus)	449.341	543,213	338.639
	4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon)	304.130	329,477	95.280
	5. Tanaman Hias (Pohon)	1.012.843	1,114,358	189.933
	6. Bibit Tan. Buah (Pohon)	167.462	184,794	66.571
3	Peningkatan Omzet Pemasaran	Rp 104,012 M	Rp 112,9 M	Rp 87.741.554.996

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KINERJA 2014	KINERJA 2015	KINERJA 2017
4	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina	64	51	105
5	Jumlah produksi susu (liter)	5.084.240	5,170,480	30706 liter
6	Mempertahankan Jakarta bebas rabies	0 kasus	0 kasus	0 kasus
7	Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya	197.644 Ton	201.338 Ton	209.333 Ton
8	- Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) - Terkendalinya Penyakit Antrax	2 Kasus (AI) 0 Kasus	5 Kasus (AI) dan 1 Kasus Brucellosis	AI 7 kasus Antrax 0 kasus
9	Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura : Padi (ton) Buah – buahan (bibit) Tanaman hias (bibit)	4.000 40.020 15.000	6.361 193.629 300.454	6.000 159.319 9.930
10	Jumlah produksi tanaman hortikultura ramah lingkungan: Sayuran (ton) Buah – buahan (phn)	84.559 9.722	16.559 918.479	24.619 9.014

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta, 2017

3. Kehutanan

a. Prioritas urusan

- 1) Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kehutanan tidak ada, Kegiatan urusan kehutanan Dinas Kehutanan hanya 1 yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkayuan dengan Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil. Adapun perbandingan program urusan Kehutanan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan program nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3.284
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kehutanan

No	Program	
	Nasional	Provinsi
1	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.	
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	
Jml	4	0

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

Pada tahun anggaran 2017, Urusan Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.285
Program Urusan Kehutanan

No.	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1	Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil	1
	Total	1

Sumber : Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Beberapa kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.286
Realisasi Program Urusan Kehutanan

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil	1	1	100
	Total	1	1	100

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kehutanan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Bidang Kehutanan dan Seksi Kehutanan Suku Dinas Kehutanan dengan jumlah pegawai 59 orang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.287
Rekapitulasi Pegawai Urusan Kehutanan

No	Klasifikasi	DINAS KEHUTANAN	Jumlah
A.	Golongan	59	59
	• Golongan IV	6	6
	• Golongan III	44	44
	• Golongan II	9	9
	• Golongan I	0	0
B.	Eselon	59	59
	• Eselon II	-	-
	• Eselon III	-	-
	• Eselon IV	1	1
	• Fungsional	8	8
	• Staf	-	-
C.	Pendidikan	-	-
	• S3	50	50
	• S2	59	59
	• S1	-	-
	• Diploma	8	8
	• SLTA	33	33
	• SLTP	2	2
	• SD	13	13

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.288
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Kehutanan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas Kehutanan					
	• Eselon II	-	-	-	-	-
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	8	8	8	2	8
	TOTAL	9	9	9	3	9

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 9 / 9 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 9 / 3 = 33 %
- Kepangkatan : 9 / 9 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Kehutanan merupakan bagian dari alokasi anggaran pada Dinas Kehutanan dan SKPD/UKPD lainnya, yaitu :

Tabel 3.289
Alokasi Program Kegiatan Urusan Kehutanan
pada Dinas Kehutanan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEHUTANAN	296.612.417	288.182.700	97,16
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	296.612.417	288.182.700	97,16
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	296.612.417	288.182.700	97,16
- Belanja Pemeliharaan	72.193.792	69.723.500	96,58
c. BELANJA MODAL	-	-	#DIV/0!
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	296.612.417	57.365.040.315.366	0,0005
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	-	288.182.700	0,0000
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	69.723.500	288.182.700	24,19

• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	69.723.500	288.182.700	24,19
--	------------	-------------	-------

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kehutanan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.290
**Sarana dan Prasarana
Urusan Kehutanan**

Urian Sarana dan Prasarana		Jumlah
1.	Pusat Perkayuan - TPK Cipinang - TPK Pondok Pinang - TPK Sukapura - TPK Ujung Menteng	4 Sub unit
2.	Pusat Peredaran Hasil Hutan - Pos Pelayanan Sunda Kelapa - Pos Pelayanan Kalibaru - Pos Pelayanan Klender - Pos Pelayanan Ujung Menteng - Pos Pelayanan Cengkareng	5 sub unit

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

Tabel 3.291
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kehutanan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	2	9
2.	Kota Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	2	9
3.	Website	1								1
4.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	2	9
5.	Call Center	1	1	1	1	1	1	1	2	9

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2017

Provinsi

- Website : dkpjakarta.web.id
- E-mail : dkp.jakarta@yahoo.com
- Call Center : 021 6285277, 021 6007251

Jakarta Pusat

- E-mail : tan_hut_jp@yahoo.com
- Call Center : 021 3851854

Jakarta Utara

- E-mail : sudinpertanian@yahoo.com
- Call Center : 021 4358783
- Jakarta Timur
- E-mail : sudin_tanhut_jaktim@yahoo.com
- Call Center : 021 4808335
- Jakarta Selatan
- Call Center : 021 7205794
- Jakarta Barat
- E-mail : sudintanhutjakbar@yahoo.co.id
- Call Center : 021 58356239
- Kepulauan Seribu
- E-mail : ikanseribu@yahoo.com
- Call Center : 021 58356239
- UPT
- E-mail : upt.kayu.dki@gmail.com
- Call Center : 021 4600889

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Kehutanan merupakan gabungan *bottom up* dan *top down planning*, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan Perencanaan Daerah.

Tabel 3.292
Sinkronisasi Perencanaan Program Kehutanan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	1	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	1		

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2017

h. Permasalahan dan solusi

- Keterbatasan lahan dalam mewujudkan Ruang terbuka hijau (RTH) guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pembebasan lahan milik/privat dengan APBD Provinsi DKI Jakarta.
- Kesadaran sebagian pihak terhadap RTH/Hutan Kota

dan Hutan Negara masih rendah sehingga di beberapa kawasan masih terjadi perambahan/penyerobotan lahan secara illegal, sehingga perlu peningkatan pengamanan dan pengawasan kawasan, pembangunan pos jaga dan pagar pengaman, operasi terpadu, koordinasi lintas sektor, pembuatan papan peringatan/larangan dan penindakan.

- Kesadaran sebagian masyarakat/pihak dalam mendukung program pemerintah “One Billion Trees”/Program Penanaman Satu milyar Pohon masih belum optimal, sehingga perlu sosialisasi, penggalangan “CSR/Corporate Social Responsibility pada BUMN, BUMS untuk ikut berpartisipasi mendukung penanaman pohon serta sumbangan bibit (buah-buahan dan tanaman pelindung) secara cuma-cuma

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- 1) Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kehutanan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.293
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kehutanan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub
1.	Permen Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006, jo. P.63/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara jo. Permenhut P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara	Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta, 2017

- 2) Data hasil pembebasan dari tahun 2010-2016 adalah :

Luas kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.294
Luas Kawasan Hutan Perairan dan Daratan di Provinsi DKI Jakarta (Ha)

No	Status Hutan	LUAS (Ha)
1	Taman Nasional Kepulauan Seribu	107.489,00
JUMLAH		107.489,00
1	Hutan Lindung	44,76
	a. Hutan Lindung Angke Kapuk	44,76
2	Hutan Produksi	157,65
	a. Kawasan Jalur Hijau Mangrove Tol Sedyatmo	95,05
	b. Transmisi PLN	23,70
	c. Cengkareng Drain	28,39
	d. Kebun Bibit/Arboretum	10,51
3	Hutan Konservasi	210,42
	a. Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke	25,02
	b. Kawasan Wisata Alam Angke Kapuk	99,82
	c. Suaka Margasatwa Pulau Rambut	45,00
	d. Cagar Alam Pulau Bokor	18,00
	e. Taman Nasional Kepulauan Seribu	18,41
	f. Lahan Kompensasi PT. KNI	1,73
	g. Lahan Kompensasi PT. Mandara Permai	2,44
Jumlah		412,83

Ket : Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002

Tabel 3.295

Data Hutan Kota Hasil Pembebasan

NO.	LOKASI	LUASAN (Ha/M2)	TAHUN PEMBEBASAN
1.	Hutan Kota Cipedak, Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	0,50	2006
2.	Hutan Kota Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	0,60	2007
3.	Hutan Kota Ujung Menteng, Cakung Jakarta Timur.	1,43	2008
4.	Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur	2,11	2009
5.	Hutan Kota Pondok Labu, Jakarta Selatan	2,02	2009
6.	Hutan Kota Rawa Buaya, Jakarta Barat	1,09	2009
7.	Hutan Kota Jagakarsa, Jakarta Selatan	1,18	2009

8.	Hutan Kota Kembangan, Jakarta Barat	1,80	2010
9.	Perluasan Hutan Kota Munjul	0,70	2011
10.	Hutan Kota Rawa Malang, Semper Timur Jakarta Utara	5,70	2011
11.	Hutan Kota Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara	1,34	2012
12.	Hutan Kota Kel. Setu, Kec Cipayung Jakarta Timur	0,93	2012
13.	Hutan Kota Jalan JOE Kel Lenteng Agung Jakarta Selatan	0,93	2012
14.	Hutan Kota Rorotan (perluasan), Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	0,84	2013
15.	Hutan Kota Pondok Ranggon, Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur	0,44	2013
16.	Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Interaktif di Jakarta Timur	1,3267	2017
17.	Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Kelurahan Ciracas	1,3147	2017
18.	Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di cilincing	0,9037	2017
19.	Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di Pulogebang	1,100	2017
JUMLAH		26,2551	

Tabel 3.296
Hutan Kota Di Provinsi DKI Jakarta

No	Hutan Kota	Luas (ha)	Status (SK / Tahun Pembebasan)	Kota Administrasi
1	Srengseng	15,00	SK Gubernur No 202/1995	Jakarta Barat
2	Waduk Sunter Utara	8,20	SK Gubernur No 317/1999	Jakarta Utara
3	Kampus Universitas Indonesia	55,40	SK Gubernur No 3487/1999	Jakarta Selatan
4	Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma	3,50	SK Gubernur No 338/2002	Jakarta Timur
5	Kemayoran	4,60	SK Gubernur No 339/2002	Jakarta Utara
6	Komplek Kopassus Cijantung	1,75	SK Gubernur No 868/2004	Jakarta Timur
7	Blok P Walikota Jakarta	1,64	SK Gubernur No	Jakarta Selatan

	Selatan		869/2004	
8	PT. JIEP Pulogadung	8,90	SK Gubernur No 870/2004	Jakarta Timur
9	Mabes TNI Cilangkap	14,43	SK Gubernur No 871/2004	Jakarta Timur
10	Buperta Cibubur	27,32	SK Gubernur No 872/2004	Jakarta Timur
11	Kawasan Berikat Nusantara Marunda	1,59	SK Gubernur No 196/2005	Jakarta Utara
12	PT. Jakarta Propertindo	2,49	SK Gubernur No 197/2005	Jakarta Utara
13	Masjid Istiqlal	1,08	SK Gubernur No 198/2005	Jakarta Pusat
14	Situ Rawa Dongkal	3,28	SK Gubernur No 207/2005	Jakarta Timur
	TOTAL	149,18		
15	Dukuh	0,50	Hasil Pembebasan 2004	Jakarta Timur
16	Cipedak	0,49	Hasil Pembebasan 2006	Jakarta Selatan
17	Srengseng Sawah	0,57	Hasil Pembebasan 2007	Jakarta Selatan
18	Ujung Menteng	1,43	Hasil Pembebasan 2008	Jakarta Timur
19	Rawa Buaya	6,19	Hasil Pembebasan 2009	Jakarta Barat
20	Hutan Kota Jl. Kahfi II Jagakarsa	1,18	Hasil Pembebasan 2009	Jakarta Selatan
21	Hutan Kota Pondok Labu	2,02	Hasil Pembebasan 2009	Jakarta Selatan
22	Munjul	2,80	Hasil Pembebasan 2009 dan 2011	Jakarta Timur
23	Kembangan Utara	1,85	Hasil Pembebasan 2010	Jakarta Barat
24	Hutan Kota Rawa Malang Semper Timur	5,77	Hasil Pembebasan 2011	Jakarta Utara
25	Setu	0,93	Hasil Pembebasan 2012	Jakarta Timur
26	Hutan Kota Jalan JOE	0,93	Hasil Pembebasan 2012	Jakarta Selatan
27	Hutan Kota Rorotan	2,18	Hasil Pembebasan	Jakarta Utara

			2012 dan 2013	
28	Pondok Ranggon	0,44	Hasil Pembebasan 2013	Jakarta Timur
29	Cilangkap	4,28	Hasil Pembebasan 2013	Jakarta Timur
30	Hutan Kota Sukapura	2,40	Serah Terima dari Taman Ternak Tahun 2014	Jakarta Utara
31	Cilincing	0,90	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Utara
32	Pulogebug	1,10	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Timur
33	Cipayung	1,33	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Timur
34	Ciracas	1,31	Hasil Pembebasan 2015	Jakarta Timur
TOTAL		38,60		
GRAND TOTAL		187,78		

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta, 2017

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Prioritas urusan

Program Prioritas Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 di DKI Jakarta. yaitu :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota
- 3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebanyak 100 % (3 dari 3 Program Nasional), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.297
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan ESDM

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Program Peningkatan aksesibilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasana Energi	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan
4.		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
5.		Program Pengelolaan Kendaraan Dinas
6.		Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Jml	2	6

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 6 program dengan 159 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.298
Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7
2.	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota	64
3.	Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan	3
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	82
5.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	2
6.	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD	1
	Jumlah	159

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama Tahun 2017.

Tabel 3.299
Realisasi Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	7	6	85,71
2	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota	64	62	96,88
3	Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan	3	3	100,00
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	82	81	98,78
5	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	2	2	100,00
6	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD	1	1	100,00
	TOTAL	159	155	97,48

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2017

Capaian kinerja lain dalam urusan energi dan SDM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa yang dilaksanakan oleh PT Pertagas dan PGN sepanjang 37 km melalui pembangunan pipa gas jalur Muara karang – Muara Tawar sepanjang 25 km dan jalur Pulogebang – Kampung Melayu sepanjang 12 km. Hasil (outcome) dari Pembangunan ini yaitu untuk menambah aksesabilitas penyediaan gas bagi SPBG yang ada di wilayah DKI Jakarta sehingga mendorong kendaraan umum dan kendaraan lain yang terhibrida dengan bahan bakar gas dapat menggunakan bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis

2. Dipertahankannya prosentase terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa melalui koordinasi pemanfaatan jalur pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km yang masuk wilayah DKI Jakarta. Hasil (outcome) dari pelaksanaan koordinasi ini adalah terciptanya sinkronisasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang layak dan tepat guna
3. Tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk penyediaan gas transportasi sebanyak 31 unit berupa SPBG On-line, Mobile Refueling Unit (MRU) dan SPBU Eco-station yang tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi. SPBG On-line merupakan SPBG yang mendapatkan pasokan gas secara langsung menggunakan pipa gas. SPBG biasanya didirikan pada lokasi yang tersedia pipa gas dan lahan yang luas untuk pembangunan SPBG. Mobile Refueling Unit (MRU) merupakan SPBG yang bergerak yang biasanya ditarik/digendong menggunakan trailer dan mempunyai kapasitas penyimpanan terbatas dan debit yang kecil dibandingkan SPBG On-line. MRU biasanya ditujukan bagi kendaraan kecil dan memudahkan aksesabilitas para pengguna kendaraan bermotor berbahan bakar gas untuk mendapatkan bahan bakar gas tersebut. SPBU Eco-station merupakan SPBU yang dilengkapi dengan dispenser bahan bakar gas layaknya SPBG namun dengan debit yang lebih kecil. SPBU Eco-station ini biasanya berlokasi di dekat jalur pipa gas namun tidak memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan SPBG mandiri sehingga harus menumpang pada SPBU eksisting dengan menambahkan dispenser khusus bahan bakar gas. Hasil (outcome) ini adalah meningkatkan kemudahan masyarakat yang menggunakan

bahan bakar gas pada kendaraan dan alat transportasinya dalam menjangkau SPBG terdekat sehingga mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dapat beralih ke Bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis

4. Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik dan jaringannya oleh PT. PLN (Persero), diantaranya melalui pembangunan:
5. Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Grogol II
6. Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Gambir Lama
7. Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Plumpang II
8. Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Pulogadung II
9. Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) / Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) / UGC Looping Jakarta
10. Hasil (outcome) dari pelaksanaan koordinasi adalah untuk meningkatkan keandalan kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun rasio elektrifikasi sudah hampir mencapai 100% dan kebutuhan kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta telah terpenuhi, namun untuk meningkatkan keamanan dan cadangan kelistrikan maka perlu peningkatan dan pengembangan kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero)
11. Berfungsinya pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 108,7 KWP berupa PJU PLTS (di 5 walikota, 7 pulau Kep. Seribu, bantaran Banjir Kanal Timur / BKT, PLTS terpusat (di Pulau Sebir, Gedung Dinas Perindustrian dan Energi, gedung

sekolah SMP 12 dan 19), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/PLTB di Pulau Karya. Hasil (outcome) dari keberfungsian energi baru terbarukan ini di antaranya adalah untuk meningkatkan diversifikasi energi di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun pengembangan energi baru terbarukan yang ada sekarang kurang bernilai ekonomis, namun bisa menjadi pionir dan contoh pengembangan penerapan energi baru terbarukan.

12. Terpasangnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Protokol, kolektor, lingkungan dan gang/MHT sebanyak 94.368 titik dengan teknologi lampu PJU LED Smart System. Hasil (outcome) dari pemasangan lampu PJU LED Smart System ini adalah dapat mengetahui data persebaran lampu PJU beserta jaringannya secara akurat dan menekan pemakaian energi listrik akibat penggunaan lampu dengan teknologi LED serta meningkatkan analisis gangguan pada lampu PJU.
13. Terpasangnya kWh meter di gardu sebanyak 746 titik pada Tahun 2017 dan 2.236 titik sampai dengan Tahun 2017 dalam rangka normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi. Hasil (outcome) dari pemasangan kWh meter ini adalah dapat mengetahui perhitungan pemakaian energi listrik pada jaringan lampu PJU secara lebih akurat dan akuntabel dengan diimbangi oleh normalisasi jaringan PJU dan penggunaan lampu PJU dengan teknologi hemat energi
14. Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi (Peta Resiko Gempa pada bangunan dengan berbagai skenario kejadian gempa per kecamatan sesuai dengan RDTR Jakarta 2030. Hasil (outcome) dari pelaksanaan ini adalah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan akan kemungkinan terjadinya bencana geologi dengan menyiapkan skenario-skenario mitigasi sesuai dengan lingkup dan kewenangannya

15. Tersedianya Sumur Resapan yang terbangun sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 7.463 Sumur Resapan Eksisting. Hasil dari pelaksanaan ini adalah dalam rangka mengurangi limpasan air hujan (run-off) serta dalam rangka konservasi air tanah

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Dinas Perindustrian dan Energi memiliki pegawai sebanyak 258 orang dimana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi memiliki pegawai sebanyak 176 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.300
Rekapitulasi Pegawai Urusan ESDM

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	176	
	• Golongan IV	20	
	• Golongan III	121	
	• Golongan II	33	
	• Golongan I	2	
B.	Eselon	176	
	• Eselon I	1	
	• Eselon II	11	
	• Eselon III	28	
	• Eselon IV	136	
	• Eselon V	176	
	• Fungsional	22	
	• Staf	85	
C.	Pendidikan	11	
	• S3	55	
	• S2	1	
	• S1	2	
	• Diploma	176	
	• SLTA	20	
	• SLTP	121	
	• SD	33	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.301
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan ESDM

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon I	1	1	1	1	1
2	Eselon III	11	11	6	7	8
3	Eselon IV	28	28	27	21	25
	JUMLAH	40	40	34	29	34

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 34 / 40 = 85 %
- Diklat Kepemimpinan : 29 / 40 = 72,5 %
- Kepangkatan : 34 / 40 = 85 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 sebesar Rp 1.536.875.103.977 yang terserap sebesar Rp. 1.194.304.790.331 atau sebesar 77,71 %.

Tabel 3.302
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan ESDM

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGARAN URUSAN ESDM	1.536.875.103.977	1.194.304.790.331	77,71
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	89.142.888.800	84.512.230.076	94,81
2. BELANJA LANGSUNG	1.447.732.215.177	1.109.792.560.255	76,66
a. BELANJA PEGAWAI	0	0	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1.384.838.286.993	1.066.058.231.032	76,98
BELANJA PEMELIHARAAN	8.394.357.084	4.590.984.105	54,69
c. BELANJA MODAL	62.893.928.184	43.734.329.223	69,54
CATATAN : PERBANDINGAN			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	1.536.875.103.977		
Belanja Modal : Belanja URUSAN	62.893.928.184	1.536.875.103.977	4,09
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	8.394.357.084	1.384.838.286.993	0,61
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	8.394.357.084	1.536.875.103.977	0,55

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Energi dan SDM tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.303
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi ESDM

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1		7
2.	Posko Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1		7
3.	Leaflet	1								1
5.	Stand Banner	1	1	1	1	1	1	1		7
6.	Website	1								1
7.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1		7

Catatan :

- Website : <http://disperindgi.jakarta.go.id/>
- E-mail :
 - dinasindergi@jakarta.go.id
 - dinasindergi.pusat@gmail.com
 - dinasindergi.timur@gmail.com
 - dinasindergi.barat@gmail.com
 - dinasindergi.utara@gmail.com
 - dinasindergi.selatan@gmail.com
 - dinasindergi.tekstil@gmail.com
 - dinasindergi.bahan@gmail.com
 - dinasindergi.kerajinan@gmail.com
 - dinasindergi.kelistrikan@gmail.com

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta adalah gedung kantor, peralatan kantor, komputer, ruang rapat/pertemuan, sarana transportasi (mobil) dan sarana prasarana kerja lainnya.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat bottom up dan top down karena melaksanakan kebijakan-

kebijakan Pusat maupun Daerah. Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP) dan daerah (RPJMD/RKPD) dan kebutuhan nyata di lapangan. yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/rencana kerja (Renja) SKPD.

Tabel 3.304
Sinkronisasi Perencanaan Program ESDM

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	6	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	6	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	6	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	6		

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- Terbatas dan belum meratanya pembangunan lampu PJU baik kualitas maupun kuantitas.
- Ketergantungan pekerjaan fisik di lapangan dengan instansi lain di antaranya dengan SKPD lain, sehingga perlu adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Perkembangan kegiatan pembangunan yang sangat cepat di wilayah DKI Jakarta telah melebihi kapasitas sumber daya geologi dan bahkan mengabaikan kendala-kendala geologi yang ada.
- Kondisi lingkungan Geologi wilayah DKI Jakarta sudah tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan kegiatan pembangunan yang sangat cepat dan hal ini akan justru malah berpotensi (memicu) timbulnya bencana geologi di wilayah tersebut seperti Penurunan tanah, genangan banjir dan rob, intrusi air laut dan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
- Bencana geologi yang sudah, sedang, dan mungkin akan terjadi ditengarai karena “kondisi bawah tanah/geologi dan konservasi air tanah” di Jakarta belum dijadikan kebijakan untuk basis perencanaan dan penataan ruang wilayah. kebijakan penataan ruang di Jakarta kenyataannya hanya di occupation layer (bagian atas), meliputi pemukiman, perkantoran, kawasan niaga, kawasan industri, pertanian dsb. sedangkan di base layer (bagian bawah) yaitu kondisi geologi yang meliputi hidrogeologi, tanah dan

batuan/litologi, struktur kegempaan, daya dukung tanah dan konservasi air tanah, belum banyak menjadi pertimbangan dan masukan di dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta. Untuk itu, diharapkan kondisi bawahan tanah/geologi dan konservasi air tanah dijadikan salah satu basis utama perencanaan dan pentaan ruang atas dan bawah tanah wilayah Jakarta. Kebijakan tersebut diharapkan dijadikan program prioritas yang dimulai tahun 2013 dengan memanfaatkan, menginventarisasi dan mengevaluasi data-data geologi yang ada sebelumnya dan diharapkan di akhir tahun 2015 Jakarta memiliki Rencana Induk (Master Plan) Tata Guna Lahan Berbasis Kondisi Bawah Tanah (Geologi) dan Konservasi Air Tanah 2030 sebagai acuan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030.

Solusi:

- Menjadikan geologi perkotaan sebagai salah satu basis perencanaan dan penataan ruang/wilayah kota Jakarta.
- Untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah berkelanjutan serta pola terintegrasi, pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh satu SKPD yang tupoksinya melaksanakan otonomi daerah di bidang ESDM, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 38 Tahun 2007)
- Pembangunan lampu PJU lebih mengedepankan pada skala prioritas untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- 1) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral serta Urusan Perindustrian berada dalam satu Dinas.
- 2) Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Energi dan SDM yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.305
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Energi dan SDM

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi	Pergub Nomor 267 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Energi
2.	Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air	Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0031 tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi	

5. Pariwisata

a. Prioritas Urusan

Program Prioritas Urusan Pariwisata Tahun 2017 di DKI Jakarta. yaitu :

- 1) Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata
- 2) Program Pengembangan event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Peningkatan Industri Kepariwisata
- 5) Program Sarana dan Prasarana Pariwisata

b. Program dan Kegiatan

Program nasional Urusan Pariwisata yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.306
**Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Pariwisata**

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata
4		Program Peningkatan Industri Kepariwisata
5		Program Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jml	3	5

Program urusan Pariwisata pada tahun 2017 seluruhnya sebanyak 5 program dengan 34 kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD. Dan dilaksanakan sebanyak 5 program dengan 34 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.307
Program Urusan Pariwisata

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata	1
2.	Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17
3.	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	8
4.	Program Peningkatan Industri Kepariwisata	6
5.	Program Sarana dan Prasarana Pariwisata	2
	Jumlah	34

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun kegiatan dan hasil-hasilnya pada Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.308
Realisasi Program Urusan Pariwisata

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata	1	1	100%
2.	Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17	15	88,23 %
3.	Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata	8	8	100%
4.	Program Peningkatan Industri Kepariwisata	6	6	100%
5.	Program Sarana dan Prasarana Pariwisata	2	2	100%
	Jumlah	34	34	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun relatif meningkat. Demikian pula kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Data jumlah wisatawan dan kontribusi pariwisata dimaksud sebagai berikut.

Tabel 3.309
Jumlah kunjungan Wisatawan

No	Tahun	Jumlah Wisatawan		Jumlah
		Nusantara	Mancanegara	
1.	2013	31.440.000	2.313.742	33.753.742
2.	2014	41.871.178	2.319.295	44.190.473
3.	2015	29.713.103	2.372.396	32.085.499
4.	2016	31.645.333	2.512.005	34.157.338
5.	2017	35.464.572	2.658.055	34.157.338

Tabel 3.310
Kontribusi Sektor Pariwisata

No	Tahun	Jumlah (Triliun)		%	Ket
		Kontribusi	PDRB		
1.	2013	3.122.227.781.520		667.875,1629	
2.	2014	3.729.003.586.519	1.761.410.		
3.	2015	4.309.523.665.888			
4.	2016				
5.	2017				

Capaian lain dalam Urusan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- Jumlah event pariwisata unggulan Nasional dan Internasional sebanyak 15 event terdiri dari Pemilihan Abang dan Nene Jakarta, Penyelenggaraan Kesenian Terpilih, Penyelenggaraan Kuliner dan Bazar ibu-ibu PKK se Provinsi DKI Jakarta, Penyelenggaraan Parade Teater, Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara, Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara, Penyelenggaraan Parade Musik Tradisi, Penyelenggaraan Parade Lagu Daerah, Penyelenggaraan Kirap Karnaval Keprajuritan Nusantara, Penyelenggaraan Atraksi Pencak Silat, Atraksi Pekan HUT TMII, Penyelenggaraan Atraksi Pekan Liburan Sekolah TMII, Penyelenggaraan Atraksi Pekan Lebaran/Idul Fitri, Penyelenggaraan Atraksi Pekan Desember, Jakarta Museums on Social Media Competition
- Jumlah tenaga SDM Profesi Kepariwisata sebanyak 685 peserta dengan jumlah 14 pelatihan terdiri dari pelatihan: Pelatihan SDM Profesi Kepariwisata, Jenis pelatihan: Pelatihan SDM Profesi Kepariwisata, Jenis pelatihan: Travel Consultant, Pramuwisata Muda, Security Kepariwisata, Receptionist, Liaison Officer (MICE), room Attendant, Commis Chef, Waiter/Waitresses, SDM Pengelola/Management Pariwisata berbasis Masyarakat di Kepulauan, Pramuwisata Madya, Tour Leader, Barista, Guide Diving, SDM Pengelola/Management Homestay berbasis masyarakat di Kepulauan Seribu.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Suku Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu dan Unit Pengelola/UP yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimana pegawai tersebut juga melaksanakan urusan kebudayaan.

Tabel 3.311
Rekapitulasi Pegawai Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	189	
	1. Golongan IV	24	
	2. Golongan III	118	
	3. Golongan II	43	
	4. Golongan I	4	
B.	Eselon	189	
	1. Eselon I	-	
	1. Eselon II	-	
	2. Eselon III	10	
	3. Eselon IV	21	
	4. Eselon V	-	
	5. Fungsional	158	
	6. Pelaksana (Staf)	189	
C.	Pendidikan	1	
	1. S3	29	
	1. S2	70	
	2. S1	11	
	3. Diploma	67	
	4. SLTA	8	
	5. SLTP	3	
	6. SD	189	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.312
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Pariwisata

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	-	-	-	-	-
2	Eselon III	8	8	8	8	8
3	Eselon IV	21	20	20	20	20
Jumlah		29	28	28	28	28

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 28 / 28 = 100%
- Diklat Kepemimpinan : 28 / 28 = 100%
- Kepangkatan : 28 / 28 = 100%

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran urusan pariwisata yaitu sebesar Rp. 18.208.393.319,- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.050.048.617,- (60,69%).

Tabel 3.313
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pariwisata

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGARAN URUSAN PARIWISATA	18.208.393.319	11.050.048.617	60,69%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0	0
2. BELANJA LANGSUNG	18.208.393.319	11.050.048.617	60,69%
a. BELANJA PEGAWAI	0	0	0
b. BELANJA BARANG DAN JASA	36.570.537.571	36.570.537.571	
BELANJA PEMELIHARAAN	36.570.537.571	36.570.537.571	
c. BELANJA MODAL	872.539.250	872.539.250	
CATATAN : PERBANDINGAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	18.208.393.319/298.544.431.112	11.050.048.617/ 238.111.397.102	
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	872.539.250/ 18.208.393.319	872.539.250/ 11.050.048.617	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	36.570.537.571/ 36.570.537.571	36.570.537.571/ 36.570.537.571	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	36.570.537.571/ 18.208.393.319	36.570.537.571/ 18.208.393.319	

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pariwisata tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.314
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UP	
1.	Papan Petunjuk	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Bahan Promosi/Informasi	3	-	-	-	-	-	-	-	3
3.	Tourism Information Center (TIC)	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4.	Souvenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6.	Website	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7.	E-mail	-	-	-	-	-	-	-	1	1

CATATAN :

- Website : www.jakarta-tourism.go.id
- E-mail : info@jakarta_tourism.go.id
- Call Center : 021-5205454

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 3.315
Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan

No.	Urian Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Anjungan dan Graha Wisata	Graha Wisata Raguna, TMII, Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII dan Sangkrini Jaya Raya
2.	Akademi Pariwisata Jakarta (APJ)	
3.	Informasi dan Pengembangan Website, www.jakarta-tourism.go.id Tourism Information Center (TIC) di Djakarta Theatre, Kuta Bali, Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma	Media Social : Facebook, Instagram, Youtube
4.	Pusat Pelatihan dan Profesi Kepariwisataaan	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Kegiatan kepariwisataan merupakan program *top down* yang pembahasan rencana kegiatannya diintegrasikan pada Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi.

Tabel 3.316
Sinkronisasi Perencanaan Program Pariwisata

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	5	RKPD : RENJA SKPD	75
2	RENJA SKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	5	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	5		

h. Permasalahan dan solusi

Tabel 3.317
Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih banyak sumber daya manusia profesi pariwisata belum tersertifikasi menurut standar kompetensi internasional.	Untuk meningkatkan kompetensi SDM profesi pariwisata sesuai standar internasional telah dilakukan berbagai pelatihan profesi kepariwisataan. Tahun 2017 telah dilaksanakan 14 jenis pelatihan profesi kepariwisataan oleh Unit Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata, dan telah dilakukan kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sertifikasi kompetensi profesi pariwisata.
2.	Masih rendahnya promosi berbagai destinasi wisata dan pengelolaan yang tidak optimal.	Untuk meningkatkan promosi berbagai destinasi wisata di Jakarta, telah dilakukan promosi terpadu yang melibatkan asosiasi-asosiasi di bidang pariwisata, seperti : Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), PHRI, ASITA, dan Pusat Perbelanjaan. Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI dan Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, serta bekerjasama dengan jurnalis dalam negeri dan luar negeri (asing) dalam kegiatan Famtrip Jakarta.
3.	Fasilitas dan aksesibilitas destinasi wisata kurang memadai.	Untuk meningkatkan fasilitas destinasi wisata telah dilakukan upaya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana di destinasi wisata (Museum, Kawasan PBB, PKJ

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Tim), dan untuk memudahkan aksesibilitas menuju destinasi wisata telah dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti: pembangunan dermaga menuju ke Pulauan Seribu oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, jalur wisata berkerjasama dengan Transjakarta dan lain-lain.
4	Belum banyak paket-paket wisata terpadu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.	Untuk memperbanyak paket-paket wisata terpadu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta di bidang usaha Perjalanan Umum/Travel dan agen-agen perjalanan wisata.
5.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata masih belum optimal.	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan upaya membangun jaringan informasi berbasis media yang mudah diakses publik, dan penyebaran informasi kegiatan/event pariwisata di Jakarta (Calendar Of Event) melalui jaringan sosial, media cetak, dan elektronik.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pariwisata yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.318
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Pariwisata

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Daerah

Penghargaan :

No	Penghargaan
1.	Juara 1 Stand Terbaik pada Penyelenggaraan Pameran Manado Smesco-PPI Expo 2017, Sulawesi Utara
2.	Juara 1 Stand Terbaik pada Penyelenggaraan Pameran

No	Penghargaan
	Lombok Expo 2017 Nusa Tenggara Barat.
3.	Juara III Stand Terbaik Kategori Besar of The 18th Majapahit Travel Fair 2017 Surabaya Jawa Timur
4.	Juara Umum Parade Lagu Daerah ke-34 Gita Permata Nusantara Taman mini Indonesia Indah

6. Perdagangan

a. Prioritas urusan

Terdapat 4 Program Urusan Perdagangan Tahun 2017 di DKI Jakarta yaitu :

- Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
- Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri.
- Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan.
- Program Peningkatan Pelayanan Kemetrollogian.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Perdagangan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%.

Tabel 3.319
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perdagangan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan
3	Program Persaingan Usaha	Program Peningkatan Pelayanan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
		Kemetrologian
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
Jml	4	4

Secara tupoksional, program Urusan Perdagangan merupakan bagian tak terpisahkan dari program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Pada tahun anggaran 2017 terdapat 5 program pada Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan untuk Perdagangan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.320
Program Urusan Perdagangan

NO	KEGIATAN	Jumlah Kegiatan
1	Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri	1
2	Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri	1
3	Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan	4
4	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian	11
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	10
	JUMLAH TOTAL	27

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan perdagangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.321
Realisasi Program Urusan Perdagangan

NO	KEGIATAN	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri	1	1	100
2	Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri	1	4	100

NO	KEGIATAN	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
3	Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan	4	8	100
4	Peningkatan Pelayanan Kemetrollogian	11	11	100
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	10	10	100
	Jumlah	27	27	100

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Tahun 2017

Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Ekspor Bersih Perdagangan dapat dijelaskan pada table sebagai berikut.

Tabel 3.322
Kontribusi Sektor Perdagangan

No	Tahun	Jumlah (Juta Rp)		%	Keterangan
		Kontribusi	PDRB		
4.	2010	178.357.449	862.089.737	20,69	
5.	2011	84,862,256	982.804.778	20,81	
6.	2012	228.042,600	1.103.692.660	20,66	
7.	2013	265.127.740	1.255.925.780	21,11	
8.	2014				
9.	2016	359.660.204	2.177.119.880	16,52	
10.	2017	408.344.929	2.410.373.483	16,94	

Sumber : Jakarta dalam angka, 2017

Tabel 3.323
Ekspor Bersih Perdagangan

No	Tahun	Jumlah (US\$)		Ekspor Bersih (Rp)
		Ekspor	Impor	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	2014	24.426.032.908,88	84.430.290.000	(60.004.257.091,12)
2.	2015	1.606.529.847.96	6.044,040.000	(4.437.510.152.04)
3.	2016	46.031.700.000	71.247.130.000	(25.215.430.000)
4	2017	42295,30	64554,80	(22259.50)

Sumber : Dinas Koperasi UMKM-P Prov.DKI Jakarta 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan jumlah pegawai sebanyak 124 orang. Sebagian pegawai Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan juga melaksanakan Urusan Koperasi dan UMKM.

Tabel 3.324
Rekapitulasi Pegawai Urusan Perdagangan

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	124	
	• Golongan IV	24	
	• Golongan III	97	
	• Golongan II	3	
	• Golongan I	0	
B.	Eselon	124	
	• Eselon I	-	
	• Eselon II	-	
	• Eselon III	3	
	• Eselon IV	12	
	• Eselon V	-	
	• Fungsional	34	
	• Staf	75	
C.	Pendidikan	124	
	• S3	-	
	• S2	23	
	• S1	71	
	• Diploma	10	
	• SLTA	19	
	• SLTP	0	
	• SD	1	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta , 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.325
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Perdagangan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat

1	Eselon II	-	-	-	-	-
2	Eselon III	3	3	3	3	3
3	Eselon IV	12	12	12	9	12
	Jumlah	15	15	15	12	15

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 15 / 15 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 12 / 15 = 80%
- Kepangkatan : 15 / 15 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk dua urusan yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Perdagangan.

Tabel 3.326
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PERDAGANGAN	56,686,243,292	48,954,167,690	86,36
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	50,741,779,624	44,296,086,313	87,30
2. BELANJA LANGSUNG	5,944,463,668	4,658,081,377	78,36
a. BELANJA PEGAWAI	67,000,000	54,077,644	80,71
b. BELANJA BARANG DAN JASA	5,874,163,668	4,603,404,310	78,36
- Belanja Pemeliharaan	1,330,090,586	864,517,195	64,99
c. BELANJA MODAL	3,300,000	599,426	18,16
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	4.427.046.476	200.240.785.043	2,21
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	531.412.431	4.427.046.476	12,00
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	199.999.206	3.326.134.045	6,01
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	199.999.206	4.427.046.476	4,52

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perdagangan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.327
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perdagangan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT							UPT	Jumlah
		Dinas	JP	JU	JT	JS	JB	KS		
1.	Papan Pengumuman	2	-	-	-	-	-	-	2	4
2.	Kota Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	1	2
3.	Leaflet	1	-	-	-	-	-	-	1	2
4.	Mobil Keliling	1	-	-	-	-	-	-	1	2
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
8.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Perdagangan tidak terlepas dari kepentingan dunia usaha, baik pada sektor industri maupun perdagangannya itu sendiri. Untuk itu dibentuk Forum Koordinasi Pembangunan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan. serta kegiatan dialog interaktif dengan dunia usaha. Dari kedua hal tersebut. muncul usulan-usulan kegiatan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.328
Sinkronisasi Perencanaan Program Perdagangan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	4	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	4		

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- 1) Analisa laboratorium pada kegiatan pengawasan barang SNI wajib dalam DPA terdapat kendala pada Balai Pengujian Mutu Barang Kemendag, yaitu kendala persyaratan jumlah barang contoh yang dibutuhkan dan lama waktu pelaksanaan pengujian.
- 2) Terdapatnya efisiensi dari kegiatan Pengawasan Kemetrollogian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Solusi :

Perlu meningkatkan koordinasi eksternal dengan Kemendag untuk mengetahui persyaratan uji laboratorium, baik jumlah barang yang dibutuhkan maupun lama waktu pengujian laboratoriumnya.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Perdagangan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.329
**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Perdagangan**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Pergub Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
2.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal	Pergub Nomor 309 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Metrologi
3		Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang perpasaran swasta

7. Ketransmigrasian

a. Prioritas urusan

Prioritas Urusan Ketransmigrasian adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Ketransmigrasian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.330
**Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Ketransmigrasian**

NO	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
Jml	1	1

Program ketransmigrasian di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada Tahun 2017 program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Sarana, Prasarana Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian sebanyak 2 kegiatan.

Tabel 3.331
Program Urusan Ketransmigrasian

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Peningkatan Sarana, Prasarana Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	1
	Jumlah	1

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan ketransmigrasian adalah sebagai berikut.

Tabel 3.332
Realisasi Program Urusan Ketrasmigrasian

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Ketenagakerjaan Dan Ketrasmigrasian	1	1	100

Capaian lain dalam urusan ketrasmigrasian antara lain

- Penjajakan Kerjasama Penetapan Lokasi Transmigrasi 2 lokasi.
- Pendaftaran dan Seleksi Akhir Transmigran 30 KK
- Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke 2 lokasi Transmigrasi :

Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, : 5 KK
program 10 KK

Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara : 5 KK
Program 10 KK

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah dan rincian pegawai sebagai berikut :

Tabel 3.333
Rekapitulasi Pegawai Urusan Transmigrasi

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	4	
	• Golongan IV		
	• Golongan III	4	
	• Golongan II		
	• Golongan I	0	
B.	Eselon	4	
	• Eselon II	0	
	• Eselon III	0	
	• Eselon IV	1	
	• Fungsional	0	
	• Staf	3	
C.	Pendidikan	4	
	• S2	0	
	• S1	3	

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• Diploma	0	
	• SLTA	1	
	• SLTP	0	
	• SD	0	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.334
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Ketransmigrasian

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	0	0	0	0	0
3	Eselon IV	1	1	1	0	1
Jumlah		1	1	1	0	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 1 / 1 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 1 / 0 = 00,00 %
- Kepangkatan : 1 / 1 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Ketransmigrasian melekat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2017. Khusus untuk Urusan Transmigrasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.249.250,-

Tabel 3.335
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Ketransmigrasian

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN	17.904.480,-	12.611.480,-	70,44
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	
2. BELANJA LANGSUNG	-	-	
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	
b. BELANJA BARANG DAN JASA	17.904.480,-	12.611.480,-	70,44
c. Belanja Pemeliharaan	-	-	-

d. BELANJA MODAL	-	-	-
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	17.904.480,-	12.611.480,-	70,44
• Belanja Modal : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2017 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Ketransmigrasian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.336
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Ketransmigrasian

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	0	7
2.	Kota Pengaduan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Leaflet	1	-	-	1	-	-	-	-	2
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	E-mail	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	Call Center	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

CATATAN PERBANDINGAN :

- Website : disnakertrans.jakarta.go.id
- Call Center : 021. 3847937, 3503623, 3846121

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Prasarana berupa Gedung Transito yang berlokasi di Jln H. Naman No. 1 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sedangkan untuk peningkatan keterampilan para Calon Transmigrasi bisa mengikuti berbagai pelatihan baik pada Pusat Pelatihan Kerja (PPK)

maupun kegiatan yang dilakukan oleh SKPD lain. seperti di bidang pertanian.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha khususnya pertanian di daerah tujuan transmigrasi. Oleh karena itu program ini bersifat top down dengan pendekatan persuasif.

Tabel 3.337
Sinkronisasi Perencanaan Program Ketramigrasian

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	1	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	1		

h. Permasalahan dan solusi

Jakarta sebagai kota besar menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Kota Jakarta khususnya disektor non pertanian. Namun demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya mensosialisasikan program transmigrasi kepada warga Jakarta. khususnya yang berminat di bidang pertanian. Program transmigrasi di DKI Jakarta lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada pemerataan penduduk. Tahun 2017 terdapat 10 KK yang ikut transmigrasi. Harus diakui bahwa jumlah tersebut masih rendah bila dibandingkan jumlah penduduk. Oleh karena itu sosialisasi harus diupayakan sampai di setiap Kelurahan.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Ketransmigrasian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.338
**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Ketransmigrasian**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. Industri

a. Prioritas urusan

- Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
- Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Perindustrian yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.339
**Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Perindustrian**

No	Program	
	Nasional	Provinsi
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
2	Program Penataan Struktur Industri	Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

No	Program	
	Nasional	Provinsi
Jml	3	4

Program Urusan Industri di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Industri dan Perdagangan. Adapun program khusus industri sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.340
Program Urusan Perindustrian

NO	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pengembangan dan Pengendalian Industri	1
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri	6
3	Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	23
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	27
	Jumlah	57

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2017

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan industri adalah sebagai berikut.

Tabel 3.341
Realisasi Program Urusan Industri

NO	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pengembangan dan Pengendalian Industri	1	1	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri	6	6	100
3	Program Peningkatan Kualitas Produk Industri	23	22	95,65
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	27	27	100
	Jumlah	57	56	98,24

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2017

Capaian lain urusan perindustrian tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan melalui pembinaan terhadap

50 Industri perbengkelan pada Tahun 2017 dan 196 Industri perbengkelan sampai dengan Tahun 2017. Industri perbengkelan dianggap sebagai industri jasa dimana meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai dari suatu barang, yang dalam hal ini kendaraan bermotor. Industri perbengkelan perlu menerapkan teknologi tinggi dan ramah lingkungan agar buangan dari industri perbengkelan dapat terkendali. Hal ini disebabkan karena buangan dari industri perbengkelan merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas dan Suku Dinas Perindustrian dan Energi, telah diterapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien sehingga tercipta industri perbengkelan yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan

- b. Meningkatnya jumlah kawasan pergudangan yang ditata (penataan industri) melalui penyelesaian dan penandatanganan kesepakatan (MoU) pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP di Tahun 2013. Hasil (outcome) dari penataan kawasan pergudangan ini adalah untuk menciptakan kepastian usaha bagi para industri di lokasi tersebut.
- c. Meningkatnya jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar baik peralatan pengujian yang terpelihara, peralatan pengujian yang terkalibrasi dan pengadaan alat baru di Unit Industri Bahan dan barang Teknik sebanyak 129 alat uji dan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil sebanyak 99 alat uji sehingga total terdapat 228 alat uji. Hasil (outcome) dari ketersediaan peralatan pengujian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kehandalan pengujian dan kalibrasi sesuai dengan

lingkupnya serta dapat menghasilkan retribusi bagi pemerintah daerah.

- d. Meningkatnya jumlah sentra industri dan kelompok usaha industri melalui pembinaan dan pemberdayaan pada Lokasi Rusun Pinus Elok dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Hasil (outcome) dari pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan keahlian dan pemberdayaan masyarakat pada kelompok-kelompok industri dan kelompok-kelompok masyarakat terutama di Rusun.
- e. Meningkatnya jumlah produk industri yang memenuhi standar melalui pembinaan industri yang dilakukan Dinas dan Suku Dinas serta pengujian produk industri yang dilakukan oleh unit-unit Industri dengan rincian pembinaan industri sebanyak 450 produk, dan pengujian sebanyak 5.897 produk dengan total keseluruhan sebanyak 6.347 produk. Hasil (outcome) dari pelaksanaan pembinaan produk dan pengujian produk industri ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing industri khususnya di Provinsi DKI Jakarta, dimana Unit Usaha Industri terkendala oleh zonasi dan peruntukan lahan sehingga fokus pembinaan industri adalah peningkatan kualitas produk industri dengan memanfaatkan lahan yang ada sehingga tercipta produktivitas yang lebih tinggi pada unit usaha industri

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Industri Tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi. dengan jumlah pegawai sebanyak 82 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.342
Rekapitulasi Pegawai Urusan Perindustrian

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan	82	
	• Golongan IV	15	
	• Golongan III	63	
	• Golongan II	3	
	• Golongan I	1	
B.	Eselon	82	
	• Eselon II		
	• Eselon III	3	
	• Eselon IV	11	
	• Staf	68	
C.	Pendidikan	82	
	• S2	19	
	• S1	40	
	• Diploma	4	
	• SLTA	18	
	• SLTP	1	
	• SD	0	

Sumber : Dinas Perindustrian dan energi Prov. DKI Jakarta, 2017

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.343
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Perindustrian

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	3	3	2	2	2
3	Eselon IV	11	11	11	7	11
Jumlah		14	14	13	9	13

Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- Tingkat Pendidikan : 13 / 14 = 92,86 %
- Diklat Kepemimpinan : 9 / 14 = 64,29 %
- Kepangkatan : 13 / 14 = 92,86 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perindustrian melekat pada Dinas Perindustrian dan Energi tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 18.847.002.300 yang terserap sebesar Rp. 13.820.585.818 atau sebesar 73,33%.

Tabel 3.344
**Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Perindustrian**

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGARAN URUSAN PERINDUSTRIAN	13.085.443.723	9.644.572.167	73,70
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0	
2. BELANJA LANGSUNG	13.085.443.723	9.644.572.167	73,70
a. BELANJA PEGAWAI	0	0	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	13.019.184.673	9.642.372.575	74,06
- Belanja Pemeliharaan	813.783.961	548.238.100	67,37
c. BELANJA MODAL	225.759.050	151.449.592	67,08
CATATAN : PERBANDINGAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	13.085.443.723		
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	225.759.050	13.085.443.723	1,73
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	813.783.961	13.019.184.673	6,25
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	813.783.961	13.085.443.723	6,22

Sumber : LKPD 2017 unreviewed, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perindustrian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan Prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.345
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perindustrian

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Posko Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	7

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
3.	Leaflet	1	1	1	1	1	1	1		7
4.	Stand Banner	1	1	1	1	1	1	1		7
5.	Website	1								1
6.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1		7

Catatan :

- Website : <http://disperindgi.jakarta.go.id/>
- E-mail : - dinasindergi@yahoo.com
- dinasindergi.pusat@gmail.com
- dinasindergi.timur@gmail.com
- dinasindergi.barat@gmail.com
- dinasindergi.utara@gmail.com
- dinasindergi.selatan@gmail.com
- dinasindergi.tekstil@gmail.com
- dinasindergi.bahan@gmail.com
- dinasindergi.kerajinan@gmail.com
- dinasindergi.kelistrikan@gmail.com

Sarana dan prasarana yang dipergunakan adalah gedung kantor. peralatan kantor. komputer. ruang rapat/pertemuan. sarana transportasi (mobil) dan sarana penunjang operasional lainnya.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Proses perencanaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan forum mengikutsertakan pembicara serta peserta dari Asosiasi, Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pemerhati industri, dimana para stakeholder tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan mengajukan usulan mengenai hal-hal terkait kebutuhan lingkungan industri. Setelah para stakeholder mengusulkan kebutuhannya, maka usulan tersebut dibawa dalam Rapat Teknis (Ratek) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk industri kecil menengah.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha khususnya di bidang makanan dan minuman dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik sesuai dengan (Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75 Tahun 2010)
- Masih maraknya penggunaan bahan tambahan pada makanan yang tidak sesuai, maupun yang dilarang untuk digunakan seperti formalin dan borak. (Peraturan Menteri Kesehatan 722 Tahun 1988)
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam bidang standarisasi dan legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Untuk Sentra IKM Batu Aji/Batu Mulia perlu kerjasama lintas SKPD yang didukung oleh suatu peraturan Gubernur
- Beberapa alat pengujian telah kurang akurat dan aus dimakan usia untuk itu telah dilakukan peremajaan dan pemutakhiran terhadap mesin-mesin pengujian serta memperluas cakupan uji barang pada Unit-Unit Industri yang memiliki sertifikat laboratorium SNI 17025:2008 sehingga diakui secara nasional dan Internasional
- Banyak IKM-IKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI namun karena masih menggunakan Pedoman BSN 10 sebagai Dokumen Mutunya, maka perlu pembinaan lebih lanjut kepada IKM-IKM tersebut untuk meningkatkan Dokumen mutunya berdasarkan Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2008 sehingga Sertifikat SNI yang dimiliki akan tetap berlaku
- Banyak IKM-IKM yang berdomisili di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan legalitas perizinan yang dimiliki.

Solusi :

- Melakukan koordinasi dengan unit-unit yang terkait agar dibuatkan legal formal tentang keberadaan IKM.
- Melakukan pembinaan secara berkala terhadap industri makanan dan minuman
- Memberikan kemudahan persyaratan perizinan kepada para industri rumah tangga untuk mendapatkan syarat keterangan domisili karena pada umumnya industri rumah tangga tersebut tidak mengganggu lingkungan dan para Industri Rumah Tangga ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyediaan kebutuhan masyarakat (sandang dan pangan) dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi masyarakat
- Pengawasan secara berkala terhadap industri makanan dan minuman
- Pengawasan dan pengendalian secara berkala
- Perlu pembinaan lebih lanjut kepada IKM-IKM tersebut untuk meningkatkan Dokumen mutunya berdasarkan Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO 9001:2008 sehingga Sertifikat SNI yang dimiliki akan tetap berlaku

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Perindustrian yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.346
**Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 Urusan Perindustrian**

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Pergub Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian
2.	Kepmen Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri	